

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI ACEH
FEBRUARI 2024

VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2024" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,78% (yoy). Peningkatan didorong oleh peningkatan mobilitas ditengah penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) dan stabilnya tingkat inflasi pada triwulan berjalan yang mendorong konsumsi. Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh perbaikan kinerja net ekspor antar daerah serta peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat terkendali didorong oleh terkendalinya inflasi kelompok makanan. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 1,53% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,83% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2023 cukup stabil dengan tumbuh sebesar 4,23% (yoy), sedikit lebih kuat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,21% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Lapangan Usaha Pertanian. Sementara itu, pertumbuhan ditahan oleh penurunan kinerja konsumsi pemerintah akibat penurunan dana otsus dan penurunan kinerja lapangan Usaha Pertambangan.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Februari 2024
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	8
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....	13
2.1. GAMBARAN UMUM.....	14
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	14
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT.....	16
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	18
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	19
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	19
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN I 2024.....	23
3.4. INFLASI SPASIAL.....	24
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	25
BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM.....	28
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	29
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	30
4.3. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM.....	34
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	35
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	36
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	37
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	40
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH.....	42
5.5. ELEKTRONIFIKASI SISTEM PEMBAYARAN.....	43
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	45
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	46
6.2. KEMISKINAN.....	48
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....	50
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	51
7.2. PROSPEK INFLASI.....	52
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw IV 2023	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan Tw IV 2023	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	4
Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	4
Grafik 1.9 Pertumbuhan DPK Pemerintah.....	4
Grafik 1.10 Pertumbuhan Investasi.....	5
Grafik 1.11 Realisasi Investasi PMA-PMDN.....	5
Grafik 1.12 Realisasi Pengadaan Semen.....	5
Grafik 1.13 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri.....	6
Grafik 1.14 Realisasi Ekspor Batubara.....	6
Grafik 1.15 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh.....	6
Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri Aceh.....	7
Grafik 1.17 Realisasi Impor Luar Negeri	7
Grafik 1.18 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah	7
Grafik 1.19 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Tw IV 2023.....	8
Grafik 1.20 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	8
Grafik 1.21 Produksi Padi Aceh.....	8
Grafik 1.22 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian.....	9
Grafik 1.23 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	9
Grafik 1.24 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	9
Grafik 1.25 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan.....	10
Grafik 1.26 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.....	10
Grafik 1.27 Penyaluran Pembiayaan Sektor Kontruksi.....	10
Grafik 1.28 Pertumbuhan Pengadaan Semen.....	10
Grafik 1.29 Pertumbuhan LU Pertambangan.....	11
Grafik 1.30 Perkembangan Ekspor Batu Bara.....	11
Grafik 1.31 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	11
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	15
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2023.....	19
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	20
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Emas Dunia	23
Grafik 3.4 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh	24
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh (LokBank)	29
Grafik 4.2 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh (LokPro)	29
Grafik 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	29

Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (LokBank).....	30
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokBank).....	30
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokPro)	30
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (LokBank).....	30
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan jenis.....	31
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%).....	31
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	31
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	31
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	31
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (LokPro).....	32
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	32
Grafik 4.15 Pembiayaan Konsumsi.....	32
Grafik 4.16 Proporsi Pembiayaan Konsumsi berdasarkan Penggunaan.....	32
Grafik 4.20 Penyaluran Pembiayaan LU.....	33
Grafik 4.22 Perkembangan NPF Perbankan Aceh (LokPro).....	33
Grafik 4.23 Perkembangan Pembiayaan UMKM	33
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas	36
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow	36
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan	36
Grafik 5.4 Transaksi Inflow Outflow per Kas Titipan.....	37
Grafik 5.5 Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan	37
Grafik 5.6 Temuan Uang Palsu (Lembar).....	37
Grafik 5.7 Nominal SKNBI	38
Grafik 5.8 Volume SKNBI.....	38
Grafik 5.9 Nominal BI RTGS.....	38
Grafik 5.10 Volume BI RTGS.....	38
Grafik 5.11 Transaksi ATM Debit.....	39
Grafik 5.12 Transaksi Kartu Kredit.....	39
Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	40
Grafik 5.14 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS	40
Grafik 5.15 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	40
Grafik 5.16 Transaksi KUPVA BB	41
Grafik 5.17 Disagregasi Transaksi UKA	41
Grafik 5.18 Penyaluran PKH (KPM)	42
Grafik 5.19 Penyaluran PKH (Nominal)	42
Grafik 5.20 Perkembangan Program Sembako (Nominal).....	43
Grafik 5.21 Perkembangan Program Sembako (KPM).....	43
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	46
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	48
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera	48
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2023.....	14
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan IV 2023.....	15
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2023.....	15
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2023.....	16
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2023.....	16
Tabel 2.6 Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan IV 2023.....	17
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2023.....	17
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang.....	19
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.....	19
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.....	20
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar.....	20
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga.....	21
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	21
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	21
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	22
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	22
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan.....	22
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	22
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.....	23
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% mtm).....	24
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% mtm).....	24
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% mtm).....	25
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	46
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	46
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor.....	46
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	47
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani.....	47
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	49
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan.....	49
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	51

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,17	9,47	9,51	9,61	9,35	9,65	9,31	10,70	9,80	10,19	10,03	11,61
Pertambangan dan Penggalian	2,50	2,16	2,98	2,77	2,63	2,71	2,77	2,74	2,47	2,57	2,72	2,57
Industri Pengolahan	1,53	1,62	1,65	1,42	1,43	1,68	1,66	1,70	1,49	1,60	1,61	1,67
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Konstruksi	3,32	3,21	3,53	3,77	3,04	2,96	3,51	4,00	3,15	3,20	3,56	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,50	5,18	4,96	5,41	5,18	5,27	5,19	5,69	5,74	5,56	5,69	6,27
Transportasi dan Pergudangan	2,12	1,93	2,08	2,31	2,25	2,25	2,26	2,28	2,34	2,49	2,47	2,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,34	0,35	0,50	0,47	0,51	0,53	0,54	0,53	0,55	0,56	0,59
Informasi dan Komunikasi	1,34	1,33	1,45	1,46	1,47	1,51	1,61	1,61	1,63	1,63	1,62	1,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,55	0,58	0,53	0,60	0,45	0,51	0,54	0,56	0,37	0,37	0,57
Real Estate	1,37	1,37	1,53	1,40	1,42	1,43	1,59	1,45	1,48	1,48	1,62	1,52
Jasa Perusahaan	0,20	0,19	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,23	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62	3,30	2,98	3,29	2,56	3,04	3,32	3,26	2,78	3,25	3,13	3,25
Jasa Pendidikan	0,88	0,84	0,88	1,10	0,95	0,95	0,91	1,02	0,97	1,03	0,97	0,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,09	1,16	1,25	1,26	1,29	1,22	1,26	1,20	1,26	1,33	1,21
Jasa lainnya	0,48	0,44	0,47	0,56	0,54	0,56	0,57	0,56	0,57	0,61	0,62	0,55
PDRB	32,09	33,10	34,41	35,67	33,46	34,58	35,27	37,67	35,01	36,09	36,61	39,23
PDRB Non Migas	29,58	30,95	31,36	32,90	30,82	31,87	32,50	34,92	32,54	33,61	33,88	39,23

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	17,70	18,55	18,83	19,04	18,84	19,34	19,21	18,93	19,43	19,98	19,99	20,03
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,61	0,61	0,64	0,64	0,64	0,64	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67	0,83
- Konsumsi Pemerintah	3,28	6,31	5,87	7,29	3,36	5,36	5,75	7,85	3,39	5,91	5,83	7,17
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,01	10,98	11,48	11,97	10,89	10,88	11,38	11,75	11,49	11,73	12,01	12,32
- Perubahan Inventori	0,00	0,12	0,00	-0,03	0,06	0,03	-0,02	0,09	0,37	-0,34	0,42	-0,16
- Ekspor Luar Negeri	1,60	1,12	1,37	1,85	1,65	1,64	1,68	2,08	2,06	1,60	1,24	1,34
- Impor Luar Negeri	0,08	0,19	0,14	0,64	0,18	0,36	0,19	0,36	0,33	0,13	0,30	0,69
- Net Ekspor Antarprovinsi	-2,04	-4,40	-3,65	-4,44	-1,80	-2,96	-3,21	-3,36	-2,07	-3,34	-3,25	-1,61
PDRB	32,09	33,1	34,41	35,7	33,46	34,58	35,27	37,67	35,01	36,09	36,61	39,23

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi ⁴ (%, yoy)	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Banda Aceh	1,25	1,87	2,07	2,41	3,95	6,31	7,85	6,00	5,32	2,70	1,40	1,53
Lhokseumawe	2,31	3,18	2,52	1,97	2,97	5,23	6,10	5,37	5,35	2,69	2,55	1,56
Meulaboh	1,62	2,86	1,48	2,08	3,56	6,22	8,02	6,56	6,27	2,69	2,10	1,42
Gabungan 3 Kota IHK Aceh	1,61	2,37	2,12	2,24	3,62	5,99	7,38	5,89	5,46	2,70	1,83	1,53

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Kota	Kelompok (% , yoy) – Triwulan IV 2023											
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pend.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Total
Banda Aceh	3,45	0,20	-0,23	0,05	5,05	0,00	0,08	-0,20	0,22	2,60	3,92	1,53
Lhokseumawe	1,34	4,20	0,47	-0,71	1,81	1,86	0,28	8,93	0,52	1,59	2,45	1,56
Meulaboh	0,62	1,53	0,00	3,15	5,48	1,94	0,33	0,74	0,80	2,76	5,94	1,42
Gabungan 3 Kota IHK Aceh	2,31	1,74	-0,03	0,22	3,86	0,64	0,16	2,82	0,32	2,36	3,72	1,53

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

⁴ SBH 2018

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset (Rp Triliun)	55,08	52,85	50,47	52,25	49,86	52,90	52,58	53,22	51,04	52,03	53,77	57,84
Pertumbuhan (yoy)%	-0,27	-7,04	-15,83	-10,13	-9,48	0,09	4,19	1,85	2,35	-1,66	2,26	8,68
Pertumbuhan (mtm)%	-0,74	-5,47	0,61	3,52	-0,89	0,63	1,18	0,49	2,51	-0,55	2,31	2,50
DPK (Rp Triliun)	38,46	38,96	39,90	39,50	38,47	41,11	40,14	40,09	38,98	38,86	39,87	41,93
Pertumbuhan (yoy)%	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47	0,03	5,52	-0,50	0,33	1,34	-5,47	0,41	5,78
Pertumbuhan (mtm)%	-1,61	-0,55	6,38	6,21	0,75	1,40	-0,12	-4,69	4,24	-0,31	2,10	-2,13
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,12	33,82	33,16	31,02	31,92	32,79	33,45	49,29	35,42	36,10	37,48	38,57
Pertumbuhan (yoy)%	-6,63	-10,12	-11,15	-15,30	-9,13	-3,03	0,87	9,71	10,99	10,09	12,07	12,68
Pertumbuhan (mtm)%	-1,04	-3,30	0,71	-6,45	2,30	1,48	1,35	0,71	2,00	1,49	1,47	1,04
FDR %	91,33	86,81	83,09	78,99	82,97	79,42	83,33	122,95	90,87	92,90	94,02	92,00
NPF-gross %	1,84	2,25	2,86	1,94	2,02	1,92	1,78	3,40	1,82	1,96	1,80	1,57
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,65	0,76	0,95	0,60	0,64	0,63	0,60	1,67	0,64	0,71	0,67	0,61

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total (Rp Triliun)	38,46	38,96	39,90	39,50	38,46	41,10	40,13	40,09	38,98	38,86	39,87	41,93
Pertumbuhan (yoy)%	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32	0,03	5,52	0,58	1,48	1,34	-5,47	0,41	5,78
Giro (Rp Triliun)	7,30	7,97	7,99	9,05	10,61	9,25	7,28	6,32	6,90	6,73	8,19	5,70
Pertumbuhan (yoy)%	-6,33	-3,54	-28,71	-1,95	45,23	16,16	-8,71	-30,22	-34,94	-27,23	12,33	-9,66
Tabungan (Rp Triliun)	19,4	19,33	21,04	22,09	20,27	21,45	21,49	24,07	21,55	22,52	22,07	24,99
Pertumbuhan (yoy)%	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31	4,50	10,95	2,13	7,93	6,27	4,97	3,43	4,33
Deposito (Rp Triliun)	11,75	11,66	10,88	8,15	7,58	10,40	11,35	9,71	10,53	9,61	9,62	11,24
Pertumbuhan (yoy)%	10,03	8,14	4,74	-11,02	-35,47	-10,76	4,40	19,04	38,94	-7,63	-13,23	19,87

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	35,12	33,82	33,16	31,20	31,91	32,46	33,45	34,23	35,42	36,1	37,48	38,57
Pertumbuhan (yoy) %	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30	-9,13	-3,46	0,87	9,71	10,99	10,09	12,07	12,68
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,63	8,47	8,26	7,36	7,33	7,54	7,26	6,8	6,51	66,14	6,75	6,82
Pertumbuhan (yoy)%	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68	-23,78	-10,87	-12,08	-7,63	-11,27	-12,79	-7,06	0,14
Investasi (Rp Triliun)	2,63	2,61	2,50	2,59	2,74	2,94	3,29	3,62	4,18	4,56	5,25	5,63
Pertumbuhan (yoy)%	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42	4,30	12,56	31,82	39,86	52,56	53,45	59,27	55,26
Konsumsi (Rp Triliun)	22,86	22,73	22,39	21,24	21,83	22,15	22,88	23,79	14,72	24,92	25,48	26,12
Pertumbuhan (yoy)%	-3,01	0,29	-2,26	-7,65	-4,51	-2,54	2,19	12,04	13,25	12,1	11,33	9,77

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	40,62	42,37	44,86	46,46	47,21	47,57	47,09	49,29	48,38	48,97	49,88	49,91
Pertumbuhan (yoy) %	-7,43	-1,48	3,03	11,58	16,22	12,28	5,00	6,09	2,49	2,65	5,91	1,25
Modal Kerja (Rp Triliun)	11,77	11,49	14,38	13,70	14,03	13,63	12,24	12,89	12,07	12,62	12,47	12,15
Pertumbuhan (yoy)%	(3,24)	(12,98)	4,73	12,94	19,23	18,67	-14,48	-5,92	-13,98	-7,61	1,84	-5,79
Investasi (Rp Triliun)	5,17	6,86	5,93	8,89	8,96	9,38	9,59	10,24	9,75	9,62	10,15	9,82
Pertumbuhan (yoy)%	-26,89	7,08	-5,46	51,64	73,56	36,89	61,89	15,22	8,80	2,30	5,79	-4,13
Konsumsi (Rp Triliun)	23,68	24,02	24,55	23,86	12,20	24,55	25,25	26,15	26,55	16,72	27,26	27,94
Pertumbuhan (yoy)%	-3,92	2,67	4,29	0,95	2,22	2,20	2,88	9,64	9,69	8,49	7,93	6,83

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	1,78	1,99	1,81	1,29	1,27	1,23	1,39	1,57	1,74	1,92	2,20	2,32
Pertambangan	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,41	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Industri Pengolahan	1,94	1,02	0,69	0,81	0,86	0,89	0,05	1,00	1,06	1,16	1,24	1,30
Listrik Gas dan Air	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,89	0,06	0,06	0,07	0,13	0,12
Konstruksi	0,82	0,68	0,72	0,56	0,47	0,57	0,06	0,63	0,51	0,58	0,62	0,62
Perdagangan	4,97	4,9	5,04	4,39	4,43	5,02	0,65	5,06	5,26	5,29	5,47	5,59
Pengangkutan	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	5,19	0,17	0,21	0,22	0,23	0,26
Jasa Dunia Usaha	0,32	0,15	0,14	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,20	0,23	0,23	0,23
Jasa Masyarakat	0,56	0,56	0,4	0,77	0,74	0,68	0,54	0,52	0,54	0,61	0,71	0,77
Lainnya	24,41	24,21	24,06	21,24	21,83	22,16	22,88	23,80	24,72	24,93	25,48	26,12
Total	35,12	33,82	33,16	31,2	31,92	32,65	33,45	34,23	35,42	36,10	37,48	38,57

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	2,89	2,55	3,53	2,47	2,41	2,41	2,59	2,88	2,97	3,79	4,05	4,12
Perikanan	0,40	0,40	0,39	0,76	0,69	0,42	0,42	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Pertambangan	1,08	1,06	0,87	3,91	4,78	4,94	4,72	5,52	3,59	2,47	2,27	2,42
Ind. Pengolahan	2,62	2,55	2,34	1,47	1,58	2,44	1,73	2,65	3,43	4,13	3,97	3,86
Listrik, Gas & Air	0,60	2,63	0,78	0,49	0,37	0,36	0,35	0,35	0,33	0,27	0,33	0,33
Konstruksi	1,38	1,38	1,43	1,02	0,86	0,88	0,93	0,89	0,78	0,82	0,93	0,92
Perdagangan	5,53	5,45	6,70	6,31	6,18	6,70	6,83	6,64	6,67	6,66	6,85	6,34
Hotel & Restoran	0,48	0,46	0,72	0,65	0,63	0,63	0,63	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
Transportasi, Gudang & Kom.	0,38	0,33	0,98	0,92	1,00	0,41	0,40	0,34	0,30	0,30	0,36	0,38
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,39	0,34	1,22	3,31	3,35	2,39	2,33	2,22	2,10	2,01	1,92	1,52
Adm Pemerintahan,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Pendidikan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32
Jasa Kemasyarakatan	0,59	0,59	0,47	0,81	0,79	0,72	0,57	0,55	0,56	0,62	0,73	0,78
Jasa Perseorangan	0,10	0,11	0,22	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Yg. Bim Jelas Keg-nya	0,28	0,27	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	23,68	24,02	24,55	23,86	24,21	24,70	25,25	26,15	26,55	26,72	27,26	27,94
Total	40,62	42,37	44,86	46,46	47,21	47,51	47,10	49,29	48,38	48,97	49,88	49,91

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi Aceh pada triwulan IV 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,78% (yoy).

Pada triwulan IV 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,78% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan didorong oleh perbaikan kinerja net ekspor antar daerah serta peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Untuk keseluruhan tahun 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23% (yoy) stabil dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 4,21% (yoy). Penyelenggaraan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan stabilnya inflasi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun laporan.

Perkembangan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2023 tercatat mengalami penurunan, Hal tersebut tercermin dari penurunan persentase realisasi pendapatan maupun belanja pada APBA maupun APBN.

Kinerja ekonomi Aceh tetap kuat ditopang oleh Konsumsi Pemerintah, meskipun lebih rendah pada periode laporan. Realisasi agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBA) pada triwulan IV 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp84,26 triliun atau setara dengan 95,95% dari pagu agregat belanja tahun 2023.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Gabungan Kota di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 1,53% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,83% (yoy).

Pada triwulan IV 2023, laju Inflasi Gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini utamanya didukung oleh penurunan harga komoditas *volatile food*. Penurunan inflasi tersebut tetap didukung oleh peningkatan konsumsi Rumah Tangga pada triwulan tersebut. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat di Provinsi Aceh tetap kuat di tengah penurunan inflasi pada triwulan IV 2023.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Peningkatan pembiayaan ini selanjutnya diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan lokasi bank yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Perbaikan pembiayaan juga didukung oleh penurunan *Non Performing Financing* berdasarkan lokasi bank sebesar 1,57%. Kemudian untuk pembiayaan UMKM, berdasarkan lokasi bank, rasio pembiayaannya adalah sebesar 28,21%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan IV 2023, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan IV 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Pertumbuhan sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami penurunan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, meskipun kemiskinan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh justru masih berada di urutan kedua, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh 3,92%-4,72% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran batas atas sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\pm 1\%$, sejalan dengan prospek peningkatan inflasi *volatile food* di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.



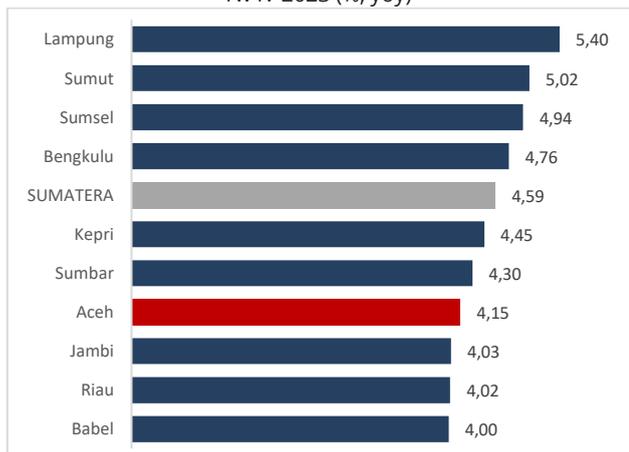
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada triwulan IV 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,78% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan didorong oleh perbaikan kinerja net ekspor antar daerah serta peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Untuk keseluruhan tahun 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23% (yoy) membaik dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,21% (yoy). Penyelenggaraan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan stabilnya inflasi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun laporan.

1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2023 menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, ekonomi Sumatera tumbuh sebesar 4,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,49% (yoy) (Grafik 1.1). Seluruh provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 5,40% (yoy), diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,02% (yoy) dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,94% (yoy).

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw IV 2023 (% yoy)

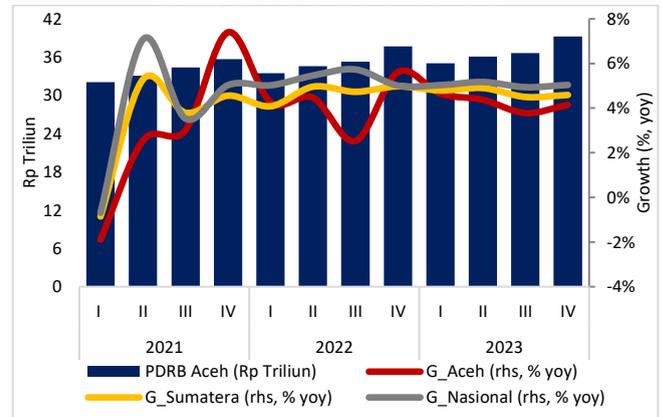


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh berlanjut di triwulan IV 2023. Pada periode tersebut, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,78% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh perbaikan kinerja net ekspor antar daerah serta peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan pada triwulan tersebut turut

didukung oleh penyelenggaraan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pada 4-12 November 2023 yang memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Kontribusi ekonomi Aceh terhadap ekonomi Sumatera relatif stabil.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Untuk keseluruhan tahun 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23% (yoy), stabil dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,21% (yoy).

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga memberikan andil pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 2,21%. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya berasal dari komponen PMTB sebesar 1,87% dan net ekspor antar daerah sebesar 0,75%. Sementara itu, ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah memberikan andil pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -0,57% dan -0,02%. Di sisi lain, impor luar negeri sebagai komponen pengurang pertumbuhan memberikan andil sebesar -0,26%.

Meningkatnya pertumbuhan sisi permintaan direspons oleh sisi lapangan usaha. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi pertumbuhan terutama bersumber dari Lapangan Usaha (LU) Pertanian (1,86%), LU Perdagangan (1,37%), LU Transportasi dan Pergudangan (0,48%), serta LU Kontruksi (0,35%). Namun, terdapat usaha yang memberikan andil pertumbuhan negatif diantaranya yaitu LU Pertambangan (-0,37%), LU Jasa Keuangan dan Asuransi (-0,16%), serta LU Industri Pengolahan (-0,07).

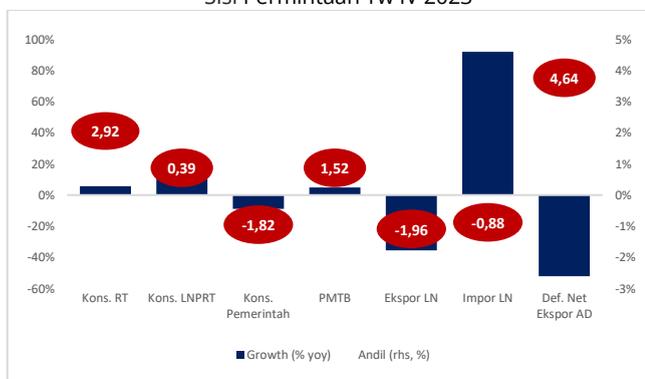
Berdasarkan pencapaian tersebut, kontribusi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar

5,02%, relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,14%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,27%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,25%), Riau (22,71%), dan Sumatera Selatan (13,92%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai 57,95% dari total ekonomi Sumatera.

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan utamanya bersumber dari perbaikan kinerja net ekspor antar daerah dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan PMTB turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan. Net ekspor antar daerah menjadi komponen yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 4,64% pada triwulan laporan, diikuti oleh konsumsi rumah tangga (2,92%) dan PMTB (1,52%).

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Tw IV 2023



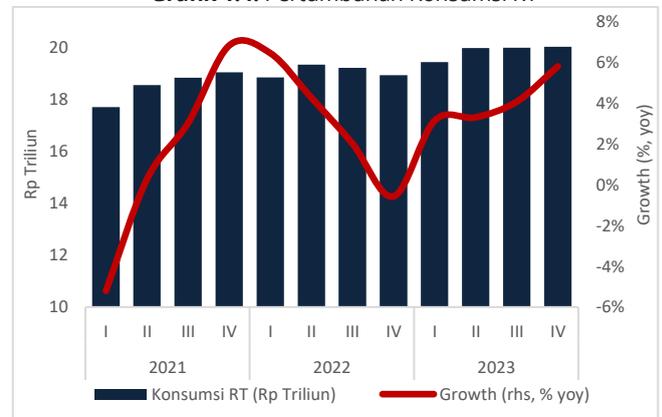
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2023, konsumsi rumah tangga melanjutkan tren pertumbuhan yang membaik. Konsumsi rumah tangga pada periode tersebut tumbuh sebesar 5,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,06% (yoy). Sehingga, konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,92%. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya konsumsi pada momentum Hari

Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pada 4-12 November 2023.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Meningkatnya konsumsi juga ditopang oleh inflasi yang mampu dijaga rendah sepanjang tahun. Selain itu, konsumsi juga ditopang oleh tren peningkatan pembiayaan secara nominal yang terus meningkat yaitu mencapai Rp27,94 Triliun. (Grafik 1.5).

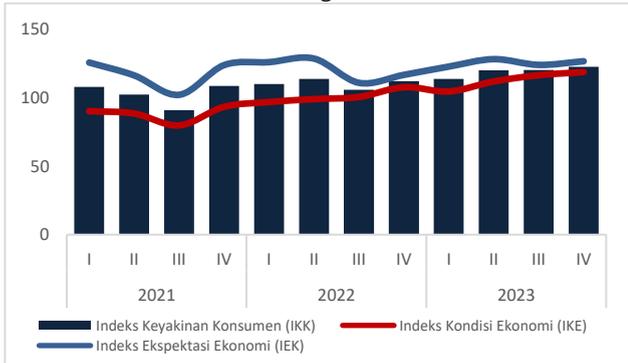
Grafik 1.5. Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi RT



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari meningkatnya optimisme masyarakat. Hasil survei konsumen menunjukkan peningkatan optimisme masyarakat pada triwulan IV 2023 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 120,24, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 122,71. (Grafik 1.6).

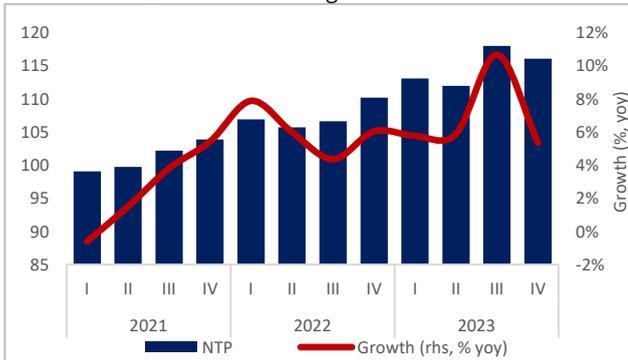
Grafik 1.6. Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Indikator pendapatan di sisi petani masih cukup baik pada triwulan IV-2023. Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode laporan tercatat sebesar 116,08, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 118,03 (Grafik 1.7). Meskipun demikian, NTP merupakan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi barang dan jasa yang dikonsumsi. Sehingga, daya tukar petani masih cukup baik dengan indeks berada di atas 100.

Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga tumbuh membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,08% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,96% (yoy). Normalisasi pasca Covid-19, terkendalinya inflasi pada level yang rendah, dan penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) mendorong kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun berjalan.

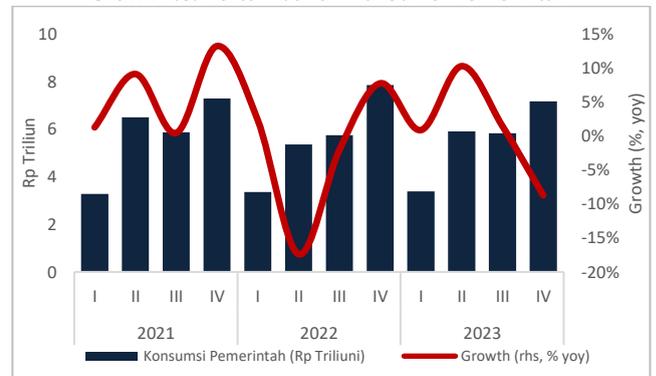
Konsumsi Pemerintah

Menurunnya dana otonomi khusus (otsus) berdampak pada menurunnya kinerja

konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh sebesar -8,74% (yoy), atau mengalami deselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,41% (yoy). Deselerasi konsumsi pemerintah pada Tw IV didorong oleh penurunan dana otsus menjadi 1% pada tahun 2023 yang berdampak pada penurunan realisasi konsumsi pemerintah pada akhir tahun berjalan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan IV 2023 mencapai Rp7,17 Triliun, menurun 8,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,85 triliun.

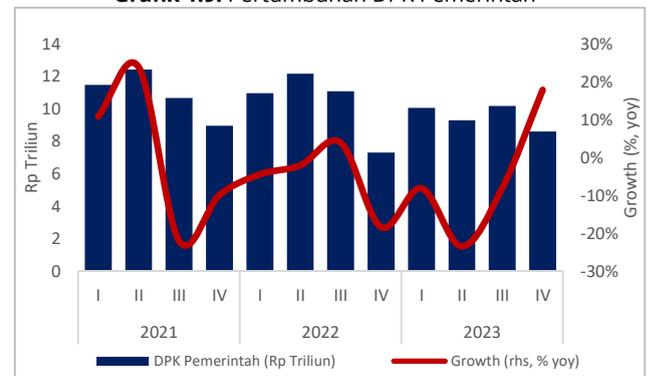
Grafik 1.8. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Realisasi belanja pemerintah yang mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan DPK Pemerintah yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah tercatat tumbuh sebesar 17,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -8,12% (yoy) (Grafik 1.9).

Grafik 1.9. Pertumbuhan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

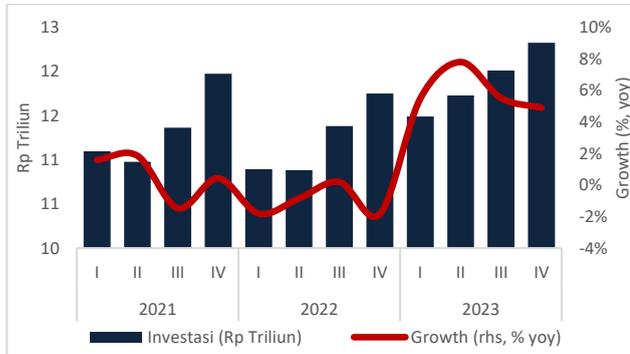
Secara tahunan, komponen belanja

pemerintah berkontraksi sebesar **-0,12% (yoy)**, **meningkat dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar -1,93% (yoy)**. Turunnya konsumsi pemerintah secara nominal sejalan dengan penurunan dana otsus menjadi 1% pada tahun 2023.

Investasi

Pada triwulan IV 2023, investasi di Aceh tumbuh melambat. PMTB di wilayah Aceh pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 5,50% (yoy). Meskipun tumbuh lebih rendah, nilai PMTB pada periode tersebut terakselerasi sejalan dengan percepatan penyelesaian target pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada akhir tahun.

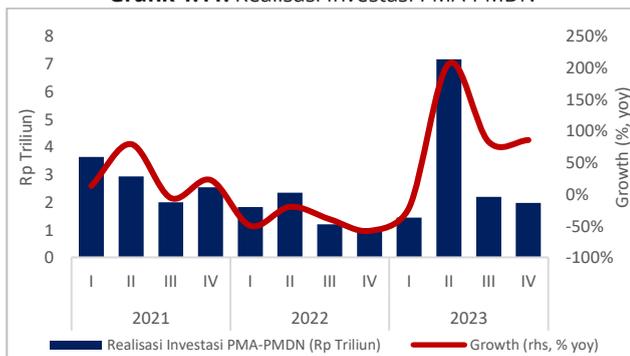
Grafik 1.10. Pertumbuhan Investasi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Indikator investasi lainnya yaitu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai total investasi investasi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 85,60% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yaitu 82,81% (yoy) (Grafik 1.11).

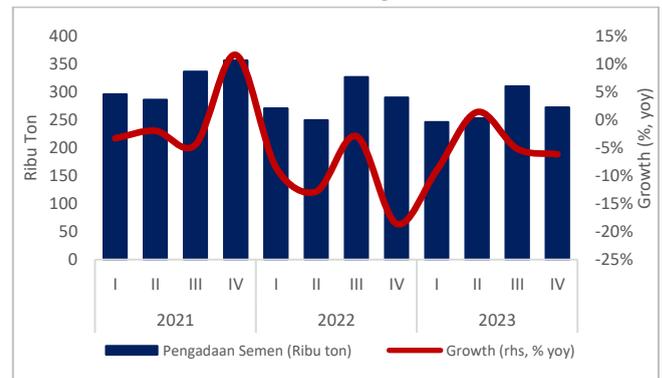
Grafik 1.11. Realisasi Investasi PMA-PMDN



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah

Sementara itu, investasi dalam bentuk bangunan terindikasi masih terbatas, terindikasi dari pengadaan semen yang masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2023. Pengadaan semen pada triwulan IV 2023 berkontraksi sebesar 6,14% (yoy), lebih rendah dibanding dengan realisasi triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,16% (yoy) (Grafik 1.12).

Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

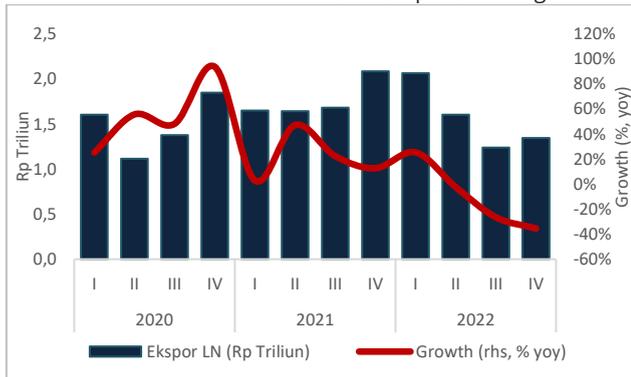
Secara keseluruhan tahun 2023, investasi di Aceh tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. PMTB pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar -1,18% (yoy). Peningkatan kinerja investasi pada tahun 2023 sejalan dengan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Sigli-Banda Aceh. Realisasi PMA-PMDN yang lebih tinggi di tahun 2023 juga mendukung peningkatan kinerja PMTB. Realisasi PMA-PMDN meningkat dari Rp6,42 Triliun pada 2022 menjadi Rp12,77 Triliun pada 2023.

Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi yang lebih dalam seiring menurunnya ekspor Batubara. Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi sebesar 35,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 26,46% (yoy). Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil negatif sebesar -1,96% terhadap kinerja ekonomi Aceh pada triwulan IV 2023. Kinerja komponen ekspor luar negeri yang

melambat tersebut didorong oleh menurunnya kinerja ekspor batubara pada triwulan berjalan.

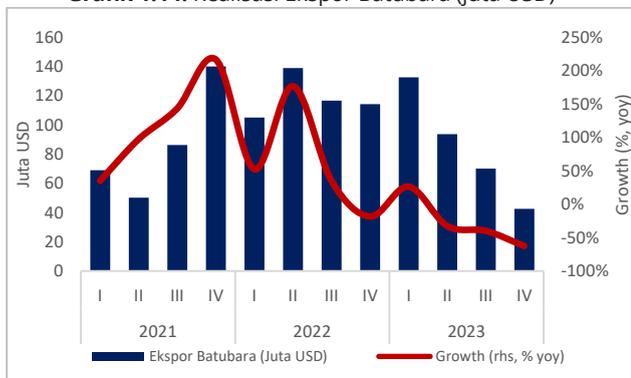
Grafik 1.13. Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekspor luar negeri Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batubara dengan pangsa sebesar 47,67%. Ekspor batubara pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi sebesar -62,61% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar -39,94% (yoy). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi batubara pada triwulan laporan di tengah melemahnya harga batubara dunia.

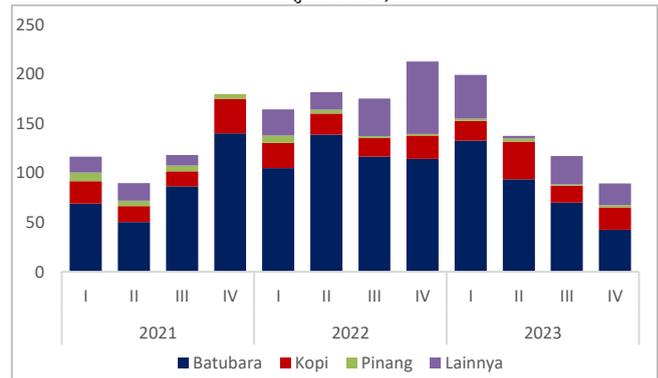
Grafik 1.14. Realisasi Ekspor Batubara (juta USD)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Komoditas ekspor luar negeri terbesar selanjutnya adalah kopi dengan pangsa 25,28%. Pada triwulan IV 2023, ekspor kopi Aceh mencapai 22,60 Juta USD, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,03 Juta USD. Sementara itu, ekspor lainnya (pangsa 24,63%) umumnya terdiri komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar 22,02 Juta USD, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 28,69 Juta USD.

Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh (juta USD)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Secara keseluruhan tahun 2023, ekspor luar negeri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor luar negeri tumbuh sebesar -11,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,71% (yoy). Penurunan kinerja ekspor disebabkan oleh turunnya harga Batubara seiring menurunnya permintaan Batubara dari Tiongkok dan India. Secara kumulatif, nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2023 adalah sebesar 609,35 Juta USD, menurun dibandingkan dengan total nilai ekspor sepanjang tahun 2022 yang sebesar 745,80 Juta USD.

Impor Luar Negeri

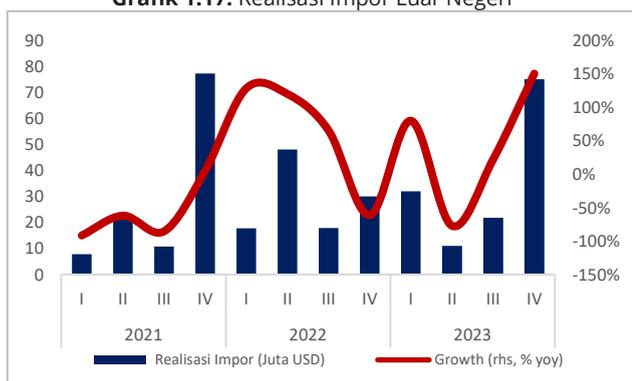
Impor mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023 seiring meningkatnya kebutuhan pasokan dari luar Aceh. Pada triwulan IV 2023, impor tumbuh sebesar 92,01% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya sebesar 61,39% (yoy). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang ke Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 sebesar 75,10 Juta USD, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 29,99 Juta USD (Grafik 1.17). Secara umum, kinerja impor luar negeri didominasi oleh impor komoditas migas terutama gas dan aspal. Sementara itu, pada triwulan berjalan juga terjadi peningkatan impor beras untuk mengantisipasi turunnya produksi padi di Provinsi Aceh karena dampak El Nino.

Grafik 1.16. Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.17. Realisasi Impor Luar Negeri



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

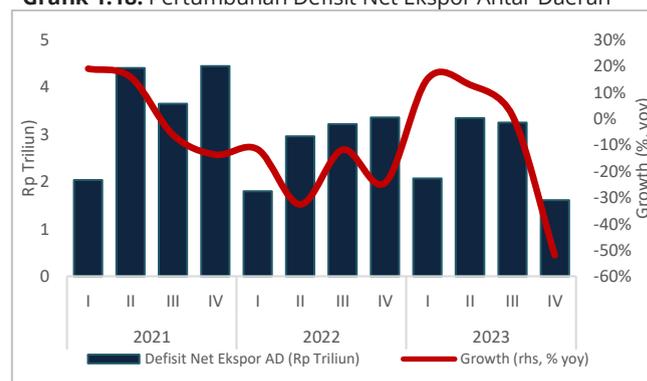
Secara keseluruhan tahun 2023, impor luar negeri tumbuh sebesar 33,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,58% (yoy). Secara umum, peningkatan impor didorong oleh kebutuhan impor beras guna menghadapi turunnya produksi padi di Provinsi Aceh. Nilai impor luar negeri secara kumulatif Januari hingga Desember 2023 adalah sebesar 148,02 Juta USD lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 113,74 juta USD. Negara asal impor didominasi oleh Amerika Serikat dengan pangsa 22,78%, disusul oleh Thailand dan Qatar dengan pangsa masing-masing sebesar 22,36% dan 15,44%. Lebih lanjut, barang-barang yang diimpor utamanya berasal dari kelompok bahan bakar mineral (gas dan aspal) sebesar 44,10%, kelompok beras sebesar 36,32% dan kelompok pupuk sebesar 10,34%.

Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah¹ Provinsi Aceh pada Triwulan IV 2023 tumbuh sebesar -52,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,14% (yoy). Pada triwulan IV 2023, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp1,61 Triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 sebesar Rp3,249 Triliun, dan lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,36 Triliun (Grafik 1.18).

Berdasarkan data perdagangan antar wilayah dari Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak mentah kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp764 Miliar. Di sisi lain, komoditas pembelian dari daerah lain didominasi oleh mobil, sepeda motor, minyak bahan bakar, kendaraan bermotor dengan tujuan khusus, dan alat transportasi umum alat transportasi umum jenis kendaraan bermotor untuk penumpang. Lima kelompok komoditas ini mencakup 41,93% dari total pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar dari Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Grafik 1.18. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Untuk keseluruhan tahun tahun 2023 terdapat kontraksi pada laju pertumbuhan neraca ekspor antar daerah sebesar 9,36% (yoy). Defisit perdagangan antar daerah pada tahun 2023 mencapai Rp10,27 Triliun, lebih rendah

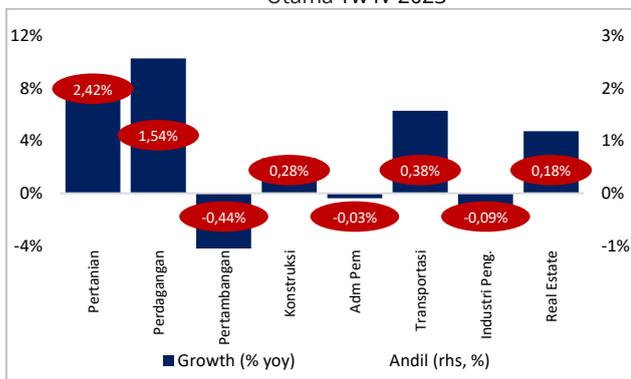
¹Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk lebih besar dari barang yang keluar.

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp Rp11,33 Triliun. Perbaikan kinerja ekspor antar daerah ini sejalan peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian khususnya subsektor perkebunan yang mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya.

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) utama di Aceh menjadi penopang membaiknya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Aceh bersumber dari tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (pangsa 29,59%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 15,98%), serta LU Konstruksi (pangsa 10,48%). Secara kumulatif, ketiga LU tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,05% terhadap PDRB Provinsi Aceh. Kinerja ketiga LU utama Aceh pada triwulan IV 2023 tumbuh membaik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Adapun pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan IV 2023 ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (andil 2,42%), LU Perdagangan Besar dan Eceran (andil 1,54%), dan LU Transportasi dan Pergudangan (andil 0,38%), dan (Grafik 1.19). Di sisi lain, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ke level yang lebih tinggi.

Grafik 1.19. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Tw IV 2023



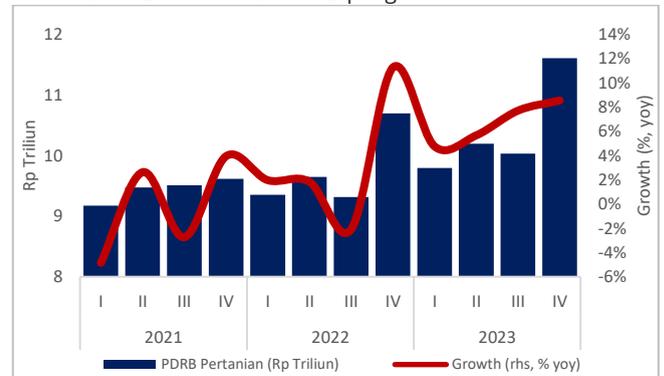
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja Lapangan Usaha Pertanian pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 8,54% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,70% (yoy). Pada triwulan IV 2023, nilai PDRB LU Pertanian sebesar Rp11,61 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp10,03 Triliun dan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp10,70 Triliun.

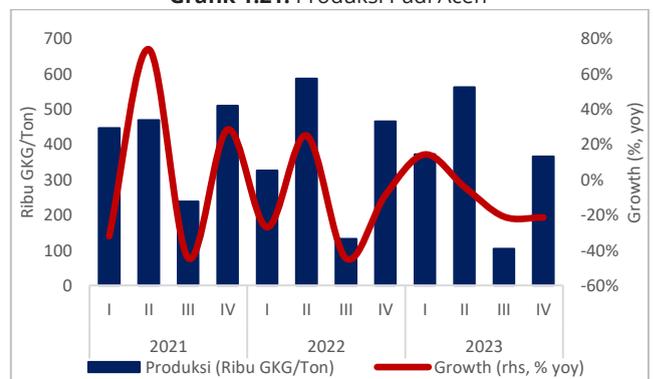
Grafik 1.20. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS pada triwulan IV 2023 menunjukkan peningkatan produksi padi sebesar 365,62 ribu GKG/ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan III sebesar 103,90 ribu GKG/ton (Grafik 1.21). Namun, dari sisi pertumbuhan, produksi padi mengalami penurunan sebesar -21,46% (yoy). Pada triwulan laporan, peningkatan kinerja LU Pertanian didukung oleh subsektor perkebunan. Hasil liaison kepada pelaku usaha pada sektor tersebut menyatakan produksi kelapa sawit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan produksi akibat terjadinya bencana banjir.

Grafik 1.21. Produksi Padi Aceh

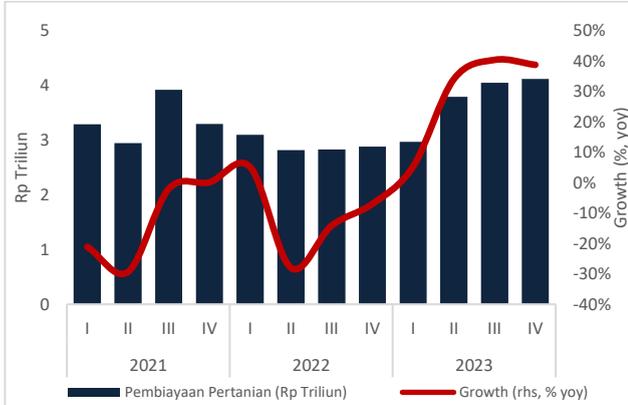


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sementara itu, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertanian mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan tahun

sebelumnya. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp4,12 Triliun atau tumbuh sebesar 38,78% (yoy) (Grafik 1.22). Hal ini menunjukkan perkembangan seluruh sektor pertanian.

Grafik 1.22. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian



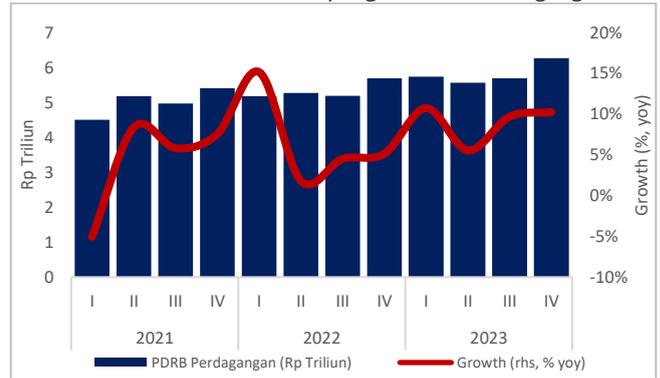
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Secara keseluruhan tahun 2023, LU pertanian mengalami kenaikan dibandingkan kinerja tahun 2022. Secara tahunan, LU Pertanian tumbuh sebesar 6,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,28% (yoy). Pertumbuhan LU Pertanian pada tahun 2023 didorong oleh peningkatan produksi TBS sebesar 4,42 ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,25 ton. Hasil liaison kepada pelaku usaha pada sektor tersebut juga menyatakan adanya peningkatan produksi pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan produksi akibat dilanda bencana banjir.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan Usaha Perdagangan pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 10,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,68% (yoy). Akselerasi LU Perdagangan pada triwulan berjalan didukung oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pada 4-12 November 2023.

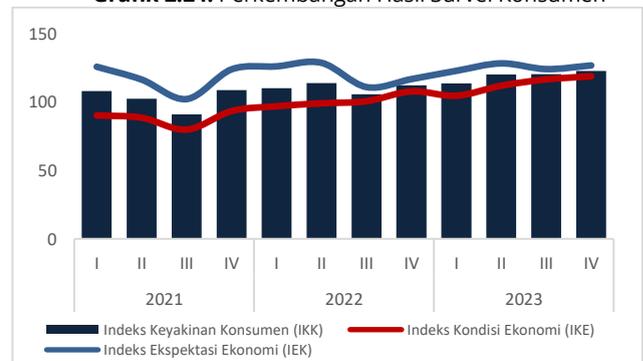
Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja sektor perdagangan tercermin dari peningkatan berbagai indeks survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2023 naik sebesar 122,71, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 120,24. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) juga menunjukkan peningkatan. IKE meningkat sebesar 118,76 pada triwulan laporan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 116,48. Sementara IEK meningkat sebesar 126,67 pada triwulan laporan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 124,00.

Grafik 2.24. Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Perdagangan juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,34 Triliun atau tumbuh sebesar -4,52% (yoy) (Grafik 1.22). Nilai ini lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,30% (yoy) dengan pembiayaan mencapai Rp6,85 Triliun.

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



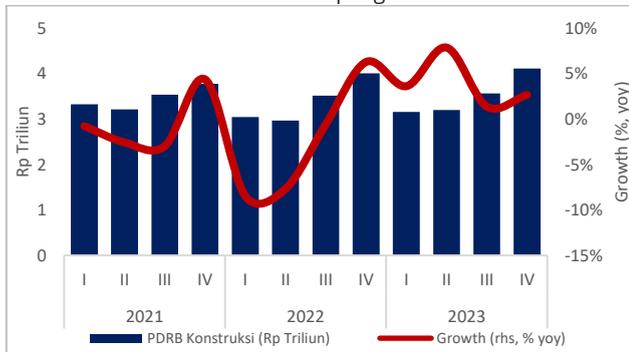
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Secara keseluruhan tahun 2023, LU Perdagangan tumbuh sebesar 9,05% (yoy) meningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,36% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya didukung oleh perbaikan kinerja perdagangan domestik sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang baik, terindikasi dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen ditengah optimalisasi pengendalian inflasi. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada tahun 2023 meningkat sebesar 118,05, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 110,09.

Lapangan Usaha Konstruksi

Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 2,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,36% (yoy). Pertumbuhan didorong oleh upaya penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada triwulan laporan.

Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

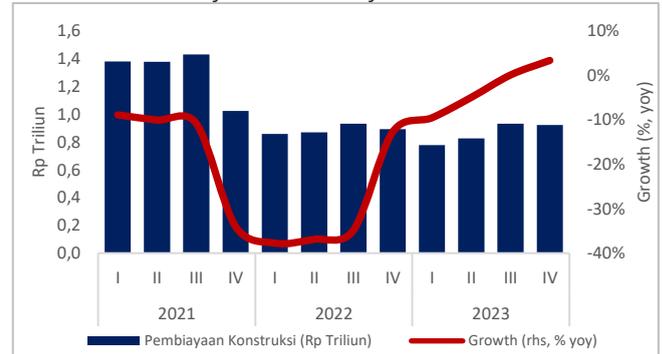


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan LU Konstruksi juga didorong oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan sektor konstruksi. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan LU Konstruksi mencapai Rp921,45

Miliar atau tumbuh sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,04% (yoy).

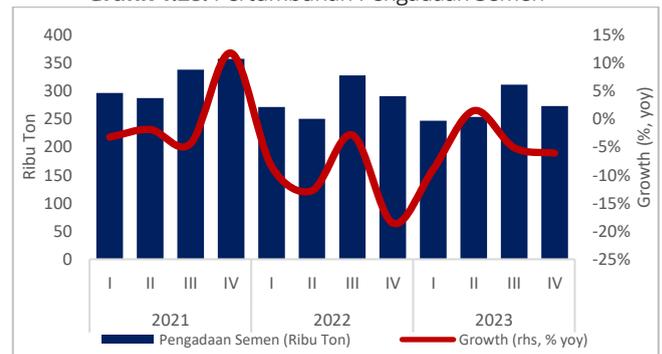
Grafik 1.27. Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, realisasi pengadaan semen pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 6,14% (yoy), atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,16% (yoy). Nominal pengadaan semen pada triwulan laporan mencapai 272,42 ribu ton, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 310,20 ribu ton (Grafik 1.28). Walaupun demikian, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan sebesar 4,49%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,59%.

Grafik 1.28. Pertumbuhan Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Secara keseluruhan tahun 2023, LU Konstruksi tumbuh sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -2,26% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2023. Penyaluran pembiayaan sektor konstruksi pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dari

tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 12,76% (yoy).

Lapangan Usaha Pertambangan

Pada triwulan laporan, kinerja Lapangan Usaha Pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,82% (yoy). Melalui pertumbuhan tersebut, LU Pertambangan memberikan andil faktor penahan pertumbuhan sebesar -0,44% (yoy).

Grafik 1.29. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kontraksi juga sejalan dengan pertumbuhan nilai ekspor batubara pada triwulan laporan yang tercatat masih negatif, sebesar 62,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 39,94% (yoy). Produksi batubara secara tidak langsung tercermin dari nilai ekspor ke luar negeri (Grafik 1.30). Berdasarkan hasil liaison kepada salah satu pelaku usaha di sektor pertambangan, pada triwulan laporan terjadi penurunan produksi batubara di tengah penurunan permintaan batubara dari India yang sedang mengalami peningkatan produksi domestik.

Grafik 1.30. Perkembangan Ekspor Batu Bara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Kinerja LU Pertambangan yang menurun juga sejalan dengan realisasi penyaluran pembiayaan LU Pertambangan yang mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, pembiayaan hanya mencapai Rp2,42 Triliun atau tumbuh sebesar -56,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -51,94% (yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.31. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kinerja LU Pertambangan pada keseluruhan tahun 2023 tumbuh sebesar -4,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,30% (yoy). Penurunan kinerja LU Pertambangan sejalan dengan menurunnya harga batubara dunia yang berdampak pada penurunan produksi batubara domestik sepanjang tahun 2023. Hal ini tercermin dari ekspor batubara yang menurun di tahun 2023 sebesar 338,58 Juta USD dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 474,09 Juta USD. Penurunan ekspor batubara ini lebih dipengaruhi oleh jatuhnya rata-rata harga batubara dari 147 USD/Metric ton pada tahun 2022 menjadi 90 USD/Metric ton pada tahun 2023.

DAMPAK PENYELENGGARAAN FESTIVAL BAGI PEREKONOMIAN DAERAH

Noor (2017:30-31)⁵ menyatakan “Festival merupakan event budaya yang sangat khas dalam masyarakat. Festival juga biasa digelar oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan khusus, spirit, dan pengetahuan tentang adat kekeluargaan.” Festival adalah jenis event yang berkembang dari budaya dan biasanya memberikan izin kepada masyarakat dan pengunjung untuk terlibat langsung dalam acara festival yang diselenggarakan. Selain berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan budaya, festival dapat memberikan manfaat ekonomi seperti penjualan barang konsumsi, hunian kamar, transportasi, objek wisata yang ada disekitar kawasan/kota tempat diselenggarakan event, penjualan *merchandise* serta lapangan kerja. Selain itu, penyelenggaraan festival juga dapat menarik wisatawan mancanegara yang dapat membuka iklim investasi yang lebih baik di daerah. Oleh sebab itu, penyelenggaraan festival budaya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mendorong perekonomian daerah.

Sebagai salah satu jenis festival, Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) menjadi salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat Aceh. Terdapat beberapa rangkaian acara yang diadakan dalam PKA tahun ini diantaranya pawai budaya, pameran, festival kuliner, seminar internasional, pertunjukan dan lomba seni budaya, lomba permainan rakyat, festival busana, festival adat budaya, *business matching*, serta anugerah budaya. Sebagaimana penjelasan di atas, penyelenggaraan PKA sebagai sebuah festival budaya juga berdampak pada perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel pada periode kegiatan. Pada November 2023, TPK Provinsi Aceh mencapai 39,32%, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 sebesar 33,64%. Hal serupa juga terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan, konsumsi rumah tangga, dan sektor perdagangan yang meningkat pada periode penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Melihat kesuksesan budaya tersebut, tentu penyelenggaraan festival di Provinsi Aceh patut untuk ditingkatkan. Provinsi Aceh memiliki berbagai kekayaan budaya mulai dari tari-tarian, tenun, dan masih banyak lagi. Selain itu, Provinsi Aceh juga memiliki sejarah peradaban serta keindahan alam yang dapat dioptimalkan. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui penyelenggaraan festival atau kegiatan serupa lainnya. Dengan penyelenggaraan festival tersebut, diharapkan potensi yang ada di Provinsi Aceh semakin dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam jangka panjang, dengan semakin dikenalnya Provinsi Aceh diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik bagi daerah ini. Melihat potensi manfaat dari penyelenggaraan festival, ke depan perlu adanya penguatan sinergi yang kuat antar *stakeholders* untuk bersama-sama dalam mendorong promosi potensi yang ada di Provinsi Aceh melalui penyelenggaraan festival sehingga dapat mendorong perekonomian Provinsi Aceh di masa depan.

--000--

⁵ Noor. (2017). Manajemen Event. Bandung. ALFABETA



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah Aceh pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan maupun belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.1. Gambaran umum

Realisasi Belanja dan Pendapatan Pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan IV 2023 secara nominal maupun persentase lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah mencapai Rp84,26 triliun atau 95,95% dari pagu agregat belanja tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pada periode tersebut realisasi APBA mencapai Rp36,12 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp40,72 triliun.

Sejalan dengan Belanja Pemerintah, realisasi agregat Pendapatan Pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan APBN dan APBA pada triwulan IV 2023 mencapai Rp42,56 Triliun, menurun dibandingkan realisasi triwulan IV 2022 yang sebesar Rp47,9 Triliun. Secara persentase, pendapatan APBN dan APBD mencapai 97,14%. Dari sisi porsi, Pendapatan Transfer ke Daerah memiliki kontribusi terbesar (79,72%) dari total realisasi pendapatan APBA dengan realisasi 94,65% dari pagu triwulan IV tahun 2023.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh mengalami penurunan. Pada tahun 2023, nilai agregat pagu Belanja Pemerintah Daerah mencapai Rp38,90 triliun, menurun sebesar 13,07% (yoy). Secara umum, pagu APBD di Provinsi dan juga Kabupaten/Kota mengalami penurunan utamanya pada belanja Modal. Namun demikian, terjadi peningkatan pagu pada Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK)
Triwulan IV 2023

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-IV 2023	
 Belanja Operasi	93,08%
Belanja Modal	96,25%
Belanja Tidak terduga	28,37%
Belanja Transfer	91,70%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah hingga triwulan IV 2023 mencapai Rp36,12 triliun atau 92,85% dari total pagu belanja. Persentase realisasi Belanja Pemerintah Daerah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 90,99% dari pagu belanja 2022. Namun, secara nominal, realisasi belanja triwulan IV 2022 lebih besar, yaitu Rp40,73 triliun.

Meskipun mengalami penurunan, belanja operasi masih menjadi penopang realisasi Belanja Daerah. Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp24,36 triliun atau sebesar 93,08% terhadap pagu. Realisasi tersebut menurun dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar Rp27,59 Triliun atau 99,46% dari total pagu. Sejalan dengan Belanja Operasi, realisasi Belanja Modal juga turut mengalami penurunan realisasi dengan capaian sebesar Rp4,33 triliun pada triwulan IV 2023 atau lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang dapat terealisasi sebesar Rp6,92 Triliun.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp52,57 miliar atau Rp49,81 miliar lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan presentase realisasi terhadap pagu sebesar 28,37%.

Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan IV 2023.

REALISASI BELANJA TRANSFER TW-IV 2023		
	Belanja Bantuan Keuangan	90,27%
	Belanja Bagi Hasil	102,81%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan di triwulan IV 2023. Belanja Transfer pada periode laporan mencapai Rp7,36 triliun atau 91,70% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut membuat pertumbuhan belanja transfer mencapai 20,64% (yoy). Kedua komponen Belanja Transfer, yakni Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan. Belanja Bagi Hasil meningkat menjadi Rp943 milyar pada tahun 2023 atau tumbuh 1.830,77% dari tahun 2022 yang hanya Rp48,89 miliar. Kenaikan realisasi tersebut juga sejalan dengan Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat naik 6,03% dibandingkan triwulan IV 2022 dengan realisasi sebesar Rp6,42 triliun.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan IV 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan IV 2023 sebesar 94,64% dari pagu Pendapatan Daerah 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang terealisasi hanya sebesar 92,94% dari pagu pendapatan 2022. Secara nominal, realisasi

mencapai Rp35,39 triliun atau turun sebesar Rp3,03 triliun dari tahun 2022 (turun sebesar 7,90% (yoy)). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 79,72% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp28,21 triliun. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp5,33 triliun pada triwulan IV 2023 dengan kontribusi sebesar 15,06% dari total realisasi pendapatan APBA. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2016 s.d 2023 (Grafik 2.1.).

Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se- Provinsi Aceh Triwulan IV 2023

REALISASI PENDAPATAN APBD TRIWULAN IV 2023	
	Pendapatan Asli Daerah 97,24%
	Pendapatan Transfer 94,65%
	Lain-Lain 64,47%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan IV 2023, hampir seluruh komponen pendapatan mengalami penurunan. Realisasi Pendapatan Daerah tercatat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp41,16 triliun pada triwulan IV 2022 menjadi Rp35,39 triliun pada triwulan IV 2023. Komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain yang Sah mengalami penurunan kecuali Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer pada tahun 2023 berkontraksi sebesar 12,38% (yoy) yaitu dari Rp32,20 triliun menjadi hanya Rp28,21 triliun. Pada periode yang sama realisasi Pendapatan lain-lain juga turut mengalami kontraksi sebesar 37,16% (yoy) yaitu dari Rp425,53 miliar menjadi Rp267,4 miliar di triwulan IV 2023. Demikian halnya realisasi PAD secara nominal juga mengalami penurunan, dari Rp5,80 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp5,33 triliun pada 2023 atau turun 8,10%.

2.3. Belanja Pemerintah Pusat

Secara nominal, realisasi belanja dan pendapatan APBN di Aceh mengalami peningkatan. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp48,14 triliun (98,42% dari pagu anggaran) meningkat dibanding triwulan IV 2022 yang sebesar Rp47,60 triliun (99,17% dari pagu anggaran). Sementara, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp7,17 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,97 triliun.

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2023

REALISASI BELANJA APBN TW-IV 2023		
	Belanja Pusat	96,46%
	Transfer	99,55%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Pusat mengalami peningkatan sebesar 16,87% dari Rp17,24 triliun menjadi Rp14,75 triliun. Komponen pertumbuhan paling besar pada Belanja Pusat, yaitu Belanja Barang yang meningkat sebesar 32,85%. Nilai Belanja Barang di tahun 2023 sebesar Rp6,9 triliun lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp5,2 triliun. Peningkatan juga diikuti oleh Belanja Modal yang tumbuh sebesar 29,57% dari Rp2,45 triliun menjadi Rp3,18 triliun.

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (64,18% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami penurunan secara persentase maupun secara nominal. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 99,55% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp30,89 triliun) dan terkontraksi sebesar 5,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 100,28% dari pagu Transfer ke Daerah 2022 (secara nominal Rp32,85 triliun). Komponen Belanja transfer yang memiliki penurunan paling banyak adalah Dana Otonomi Khusus yang turun dari Rp3,96 triliun menjadi Rp7,56 triliun atau terkontraksi sebesar

47,62%. Penurunan tersebut membuat Belanja Transfer ke Daerah menurun, meskipun pada komponen lainnya, yaitu Dana Bagi Hasil meningkat 35,50% atau tumbuh dari Rp1,22 triliun menjadi Rp1,66 triliun.

Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2023

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-IV 2023		
	Pajak	105,69%
	PNBP	156,56%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Penerimaan Pajak secara nominal mengalami peningkatan. Secara nominal, Penerimaan Pajak pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp5,98 triliun, tumbuh 7,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,54 triliun. Meningkatnya penerimaan pajak, sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Aceh.

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan IV 2023

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	41,344.64	37,393.70	41,168.05	35,390.91	99.57	94.64
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,558.03	5,481.66	5,800.29	5,330.29	104.36	97.24
Pendapatan Transfer	32,565.34	29,810.39	32,201.60	28,214.12	98.88	94.65
Transfer Antar Daerah	3,043.57	1,686.87	2,740.63	1,579.11	90.05	93.61
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	177.70	414.78	425.53	267.40	239.47	64.47
BELANJA DAERAH	44,763.62	38,909.31	40,732.65	36,128.02	90.99	92.85
Belanja Operasi	27,745.05	26,181.19	27,594.41	24,368.54	99.46	93.08
Belanja Modal	7,004.65	4,507.43	6,927.97	4,338.50	98.91	96.25
Belanja Tidak Terduga	636.91	185.30	102.38	52.57	16.07	28.37
Transfer	9,377.01	8,035.39	6,107.89	7,368.41	65.14	91.70
SURPLUS/DEFISIT	- 3,418.98 -	1,515.61	435.40 -	737.10	- 12.73	48.63

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional 23 Februari 2024

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2023

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	5,450.13	6,418.87	6,826.41	7,172.75	125.25	111.74
Pajak	4,531.80	5,655.03	5,536.67	5,976.92	122.17	105.69
PNBP	918.33	763.84	1,289.74	1,195.83	140.44	156.56
BELANJA	48,003.98	48,913.60	47,606.59	48,140.47	99.17	98.42
Belanja Pusat	15,240.34	17,874.61	14,752.31	17,241.68	96.80	96.46
Transfer ke Daerah	32,763.64	31,038.99	32,854.28	30,898.79	100.28	99.55
SURPLUS/DEFISIT APBN	-42,553.85	-42,494.73	-40,780.18	-40,967.72	95.83	96.41

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional 23 Februari 2024



BAB III

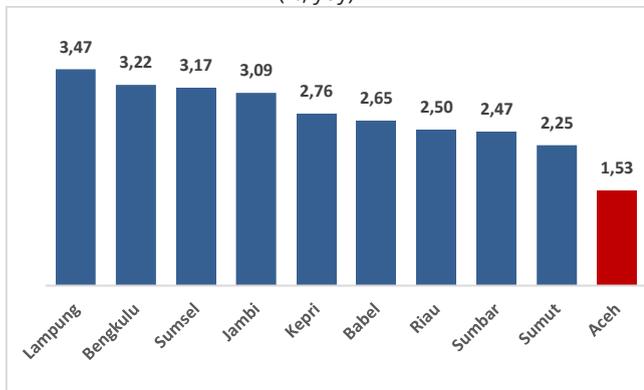
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV 2023, laju Inflasi Gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini utamanya didukung oleh penurunan harga komoditas volatile food. Penurunan inflasi tersebut tetap didukung oleh peningkatan konsumsi Rumah Tangga pada triwulan tersebut. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat di Provinsi Aceh tetap kuat di tengah penurunan inflasi pada triwulan IV 2023.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar **1,53% (yoy)** atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar **1,83% (yoy)**. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional (2,61%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, Provinsi Aceh mencatatkan inflasi terendah pertama di Sumatera.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2023 (% ,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw III 2023		Tw IV 2023	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,41	1,06	2,31	0,72
Pakaian dan Alas Kaki	2,60	0,19	1,74	0,13
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,21	0,04	-0,03	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,73	0,03	0,22	0,01
Kesehatan	3,74	0,08	3,86	0,08
Transportasi	-0,16	-0,02	0,64	0,08
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,14	0,01	0,16	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,19	0,05	2,82	0,04
Pendidikan	0,32	0,01	0,32	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,23	0,19	2,36	0,21
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,88	0,19	3,72	0,25
Inflasi Umum	1,83		1,53	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, laju inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi pada triwulan IV 2023 utamanya didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,72% dan tingkat inflasi 2,31% (yoy). Selanjutnya, diikuti oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,25% dan tingkat inflasi 3,72% (yoy). Melandainya inflasi pada triwulan laporan ditopang oleh terjaganya pasokan komoditas pangan strategis. Adapun melandainya inflasi tahunan terutama disebabkan oleh penurunan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang di tahun 2022 mengalami inflasi cukup tinggi sebesar 4,59% (yoy) turun menjadi 2,31% (yoy) di 2023. Hal ini di sumbang oleh deflasi komoditas aneka ikan antara lain ikan tongkol/ikan ambu-ambu (deflasi 0,32%, yoy), ikan dencis (deflasi 0,22%, yoy), ikan kembung (deflasi 0,14%, yoy).

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 2,31% (yoy)		ANDIL 0,72%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,66	Ikan Tongkol	-0,32
Rokok Kretek Filter	0,26	Ikan Dencis	-0,22
Cabai Merah	0,24	Ikan Kembung	-0,14
Gula Pasir	0,07	Daging Ayam Ras	-0,08
Pisang	0,07	Cumi-Cumi	-0,07

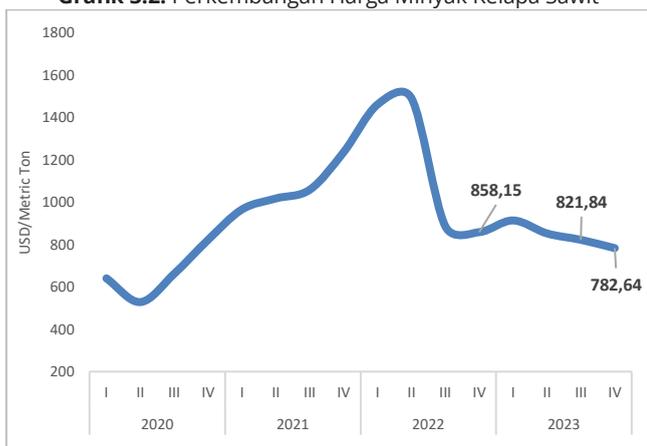
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan mengalami inflasi sebesar **2,31% (yoy)** dengan andil **0,72%**, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (**1,06%**). Komoditas utama yang menyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain beras, rokok kretek filter, cabai merah, gula pasir, dan pisang. Adanya liburan Nataru meningkatkan permintaan masyarakat untuk kelompok ini. Selain itu, Rokok kretek filter masih memiliki andil inflasi yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan cukai

rokok sebesar 10% di tahun 2023 secara bertahap. Konsumsi RT yang meningkat pada akhir tahun seiring dengan liburan sekolah serta tendensi untuk melakukan liburan pada triwulan IV juga mendorong permintaan masyarakat.

Di sisi lain, komoditas deflasi disumbang oleh Ikan Tongkol, Ikan Dencis, Ikan Kembung, Daging Ayam Ras, dan Cumi-Cumi. Deflasi yang terjadi pada komoditas perikanan salah satunya disebabkan oleh El-Nino yang berpotensi meningkatkan aktivitas *upwelling* atau naiknya air laut dari lapisan dalam ke permukaan dengan membawa air laut kaya nutrisi. Hal tersebut membuat *plankton* yang menjadi makanan ikan tumbuh dengan baik sehingga meningkatkan pertumbuhan ikan. Di sisi lain, musim kemarau yang lebih panjang membuat petani berpeluang memperpanjang masa melaut sehingga meningkatkan produksi perikanan secara umum.

Grafik 3.2. Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, diolah

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 1,74% (yoy)		ANDIL 0,13%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Seragam Sekolah Anak	0,03	-	-
Sepatu Anak	0,03	-	-
Celana Panjang Jeans Pria	0,02	-	-
T-Shirt Anak	0,02	-	-
Kemeja Pendek Katun Pria	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki tercatat sebesar 1,74% (yoy) dengan andil 0,13%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,13%). Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy) dan subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 1,14% (yoy).

Komoditas penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain seragam sekolah anak, sepatu anak, celana panjang jeans pria, *T-shirt* anak dan baju muslim anak. Peningkatan harga dipengaruhi permintaan yang cenderung meningkat pada liburan nataru yang lebih kondusif pasca Covid-19 di mana perilaku konsumsi kembali normal.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI -0,03% (yoy)		ANDIL -0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sewa Rumah	0,03	Bahan Bakar RT	-0,04
Kontrak Rumah	0,02	Besi Beton	-0,02
Semen	0,01	Seng	-0,01
Daun Pintu	0,01	-	-
Kusen	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar -0,03% (yoy) dengan andil -0,01%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,04%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok Sewa Dan Kontrak Rumah yang mengalami inflasi sebesar 0,56% (yoy). Sedangkan, subkelompok lainnya mengalami deflasi mulai dari Listrik, Gas, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga (-0,87%), Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan (-0,51%).

Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar akibat adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi yang terjadi di Bulan Desember 2023. Kebijakan tersebut

merupakan penyesuaian atas fluktuasi harga minyak dunia acuan, yaitu Mean of Platts Singapore, khususnya pada periode tanggal 24 bulan sebelumnya hingga tanggal 25 bulan berjalan. Penyesuaian harga tersebut sesuai dengan Kepmen ESDM No.245 Tahun 2022 tentang Formulasi Harga JBU atau BBM Non-Subsidi.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 0,22% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Panci	0,01	-	-
Lemari Pakaian	0,01	-	-
Piring	0,01	-	-
Pembersih Lantai	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga tercatat sebesar 0,22% (yoy) dengan andil 0,01%, inflasi lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,03%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum dengan inflasi sebesar 7,22% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah panci, lemari pakaian, piring, dan pembersih lantai.

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 3,86% (yoy)		ANDIL 0,08%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0,05	-	-
Tarif Dokter Spesialis	0,01	-	-
Obat Gosok	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 3,86% (yoy) dengan andil 0,08%, sama dengan periode sebelumnya (0,08%). Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang mengalami inflasi sebesar

6,76% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah obat dengan resep dengan andil 0,05% dan obat gosok dengan andil 0,01%.

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 0,64% (yoy)		ANDIL 0,08%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mobil	0,08	Angkutan Udara	-0,03
Sepeda Motor	0,01	Bensin	-0,01
Cuci Kendaraan	0,01	-	-
Service	0,01	-	-
Pelumas/Oli	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 0,64% (yoy) dengan andil 0,08%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (-0,02%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok jasa pengiriman barang sebesar 3,99% (yoy). Hal ini didorong pada momen nataru dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang umumnya memiliki permintaan yang tinggi terhadap pengiriman barang. Hal ini menjadi faktor pendorong mempertimbangkan transaksi e-commerce didominasi menggunakan jasa pengiriman barang. Berdasarkan data transaksi e-commerce dari beberapa marketplace di Aceh, diindikasikan tumbuh sebesar 41,69% (yoy) pada triwulan IV, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,08% (yoy). Selanjutnya, inflasi lebih tinggi pada kelompok transportasi tertahan oleh deflasi angkutan udara yang turut akibat penurunan harga avtur sebesar -12,58% (yoy) pada triwulan IV 2023, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang juga turun sebesar -8,36% (yoy).

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI 0,16% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Biaya Ponsel	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,16% (yoy) dengan andil 0,01%, atau sama dibanding periode sebelumnya (0,01%). Tekanan inflasi yang ini disebabkan oleh subkelompok layanan informasi dan komunikasi dengan inflasi sebesar 0,20% (yoy). Komoditas yang mengalami inflasi ini berasal dari biaya pulsa ponsel dengan andil 0,01%.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 2,82% (yoy)		ANDIL 0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Rekreasi	0,02	-	-
Buku Tulis bergaris	0,01	-	-
Tas Sekolah	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat sebesar 2,82% (yoy) dengan andil 0,04%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,05%). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok layanan rekreasi dengan inflasi sebesar 7,06% (yoy). Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu rekreasi dengan andil inflasi 0,02% (yoy) serta buku tulis bergaris sebesar 0,01%, dan tas sekolah dengan andil inflasi 0,01% (yoy). Kenaikan harga ini disebabkan oleh masa libur sekolah nataru yang mendorong komoditas rekreasi, serta persiapan tahun ajaran baru yang mendorong inflasi alat tulis.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,32% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sekolah Dasar	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,32% (yoy) dengan andil 0,01% sama dibanding periode sebelumnya (0,01%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini yang mengalami inflasi sebesar 1,24% (yoy). Kenaikan harga terjadi pada sekolah dasar dengan andil sebesar 0,01%.

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun¹ untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,36% (yoy)		ANDIL 0,21%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,09	-	-
Mie	0,03	-	-
Ayam Bakar	0,01	-	-
Ikan Bakar	0,01	-	-
Ikan Goreng	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tercatat sebesar 2,36% (yoy) dengan andil 0,21%, lebih rendah dibanding andil periode sebelumnya (0,19%). Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 2,36% (yoy). Kenaikan terjadi pada komoditas nasi dengan lauk, mie, ayam bakar, dan ikan bakar. Peningkatan harga pada produk makanan olahan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS)

tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 3,72% (yoy)		ANDIL 0,25%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,23	-	-
Tarif Gunting Rambut Pria	0,01	-	-
Popok Bayi Sekali Pakai	0,01	-	-
Pasta Gigi	0,01	-	-
Pembalut Wanita	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

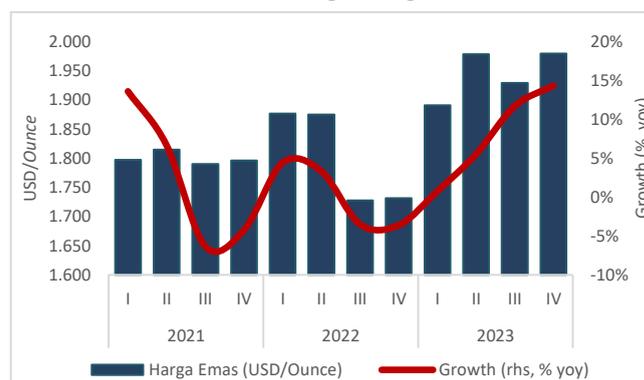
Secara tahunan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar **3,72% (yoy)** dengan andil **0,25%**, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (**0,19%**). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya dengan inflasi sebesar 8,00% (yoy).

Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil 0,23% dan tarif gunting rambut pria, popok bayi sekali pakai, pasta gigi dan pembalut inflasi mengalami inflasi dengan andil masing-masing 0,01%. Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada triwulan IV 2023 serta meningkatnya ketidakpastian global dan ketidakstabilan geopolitik di berbagai wilayah.

Harga emas dunia pada triwulan IV 2023 menunjukkan peningkatan dibanding triwulan III 2023. Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2022, harga emas dunia saat ini melambung cukup tinggi. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.3) pada triwulan III 2023 berada pada level USD1.929/ounce. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD1.978/ounce, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar USD1.727/ounce. Pada triwulan IV 2023, peningkatan harga emas mencapai 14,32% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,68% (yoy).

Grafik 3.3. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

3.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2024

Pada bulan Januari 2024, inflasi Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar **0,42% (mtm)**, sedangkan secara tahunan mengalami inflasi **2,12% (yoy)**. Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (0,42%, mtm) tercatat mengalami akselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih rendah (0,09%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 1,53% (yoy). Secara bulanan, faktor pendorong utama inflasi di Aceh adalah tomat (0,17%), bawang merah (0,08%), beras (0,07%), ikan tongkol (0,07%), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,07%).

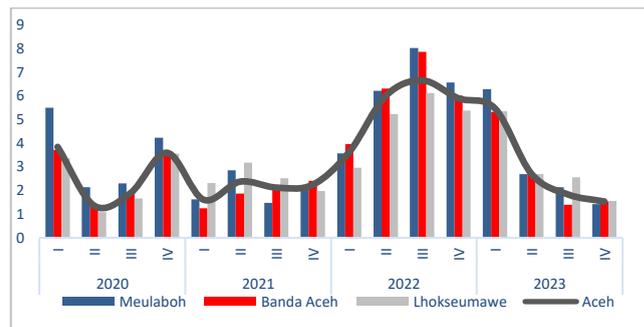
Pada bulan Februari 2024, inflasi Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar **0,71% (mtm)**, sedangkan secara tahunan mengalami inflasi **2,33% (yoy)**. Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (0,71%, mtm) tercatat mengalami akselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih rendah (0,42%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang berada pada angka 2,12% (yoy). Secara bulanan, faktor pendorong utama inflasi di Aceh adalah cabai merah (0,34%), ikan dencis (0,06%), daging ayam ras (0,05%), minyak goreng (0,04%), dan beras (0,04%).

Pada triwulan I 2024, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2024, penghitungan inflasi telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 sehingga IHK Tahun Dasar beralih dari IHK (2018 = 100) menjadi IHK (2022 = 100). Selain itu, terdapat penambahan Kab/Kota IHK baru di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Tengah sehingga di tahun 2024 terdapat 5 (lima) Kab/Kota IHK di Provinsi Aceh. Peningkatan ini berdasarkan monitoring yang dilakukan berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang menunjukkan peningkatan harga, terutama pada *volatile food*. Hal ini sejalan dengan inflasi pada beberapa komoditas pangan, terutama cabai merah dan beras. Selanjutnya, ekspektasi inflasi masyarakat saat ini meningkat terkait harga beras, meskipun menjadi hal yang perlu diwaspadai, mengingat beras secara umum memiliki andil yang besar terhadap inflasi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif untuk menjaga kestabilan ekspektasi masyarakat terhadap harga pangan, terutama beras. Selain itu, perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan akibat pergeseran musim panen sebagai dampak dari El Nino yang terjadi di sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh.

3.4. Inflasi Spasial

Secara spasial, inflasi pada Desember 2023 terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara tahunan, Lhokseumawe menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 1,56% (yoy), diikuti Kota Banda Aceh (1,53%, yoy) dan Kota Meulaboh (1,42%, yoy). Sementara secara bulanan, terdapat dua kota yang mengalami inflasi sementara satu kota lainnya mengalami deflasi. Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) diikuti oleh Kota Lhokseumawe dengan laju inflasi sebesar 0,12% (mtm). Sedangkan Kota Meulaboh mengalami deflasi sebesar 0,67% (mtm) (Grafik 3.4).

Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Komoditas utama penyumbang inflasi (mtm) terbesar Kota Banda Aceh berasal dari Angkutan Udara sebesar 0,18%, sedangkan penyumbang deflasi (mtm) terbesar adalah cabai merah, yaitu -0,18%.

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% , mtm)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Angkutan Udara	0,18%	Cabai Merah	-0,18%
Nasi Dengan Lauk	0,05%	Cumi-Cumi	-0,05%
Bawang Merah	0,05%	Ikan Rambe	-0,04%
Emas Perhiasan	0,05%	Ikan Tongkol	-0,03%
Bayam	0,05%	Ikan Kembung	-0,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi (mtm) terbesar di Kota Lhokseumawe adalah Bawang Merah dengan andil sebesar 0,15%, sedangkan andil deflasi terbesar terdapat pada komoditas Cabai Merah sebesar -0,12%.

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , mtm)

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Bawang Merah	0,15%	Cabai Merah	-0,12%
Beras	0,06%	Ikan Dencis	-0,08%
Ikan Bandeng	0,05%	Ikan Tongkol	-0,04%
Jeruk	0,04%	Udang Basah	-0,03%
Gula Pasir	0,04%	Cumi-Cumi	-0,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Terakhir, Kota Meulaboh memiliki andil inflasi terbesar pada emas perhiasan 0,09% dan andil deflasi terbesar terdapat di komoditas Ikan Tongkol, yaitu -0,49%. Komoditas perikanan memiliki andil yang besar mengingat konsumsi perikanan di Meulaboh (82,66 kg per kapita) sangat tinggi dibanding dua kota lainnya, yaitu Banda

Aceh (58,24 kg) dan Lhokseumawe (63,62 kg).

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , mtm)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	0,09%	Ikan Tongkol	-0,49%
Bawang Merah	0,08%	Ikan Dencis	-0,30%
Makanan Ringan/Snack	0,03%	Cabai Merah	-0,18%
Ikan Kembung	0,03%	Ikan Tuna	-0,04%
Telur Ayam Ras	0,03%	Ikan Cakalang	-0,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Inflasi Aceh pada triwulan I 2024 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga beberapa komoditas pangan yang disebabkan pergeseran musim panen akibat dari El Nino. Selain itu, inflasi pada triwulan I 2024 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibanding dengan triwulan IV 2023 akibat meningkatnya permintaan komoditas pangan dalam rangka bulan Ramadan yang cenderung meningkatkan konsumsi di Aceh. Penambahan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tengah ke dalam penghitungan Kabupaten/Kota IHK diproyeksikan akan turut meningkatkan inflasi Aceh apabila melihat pola rilis inflasi di bulan Januari 2024 dan Februari 2024. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $2,5\pm 1\%$ (yoy).

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pada awal tahun 2023 telah dilakukan koordinasi pengendalian inflasi yang membahas program kerja serta anggaran TPID Provinsi Aceh sepanjang tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, telah disepakati beberapa program kerja yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang

tahun 2023 untuk menjaga inflasi berada pada rentang target nasional $2,5\pm 1\%$.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan III, meliputi:

1. Rapat Koordinasi wilayah dan Kunjungan dari Mendagri ke TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota tanggal 25 Juli 2023.
2. Pasar Tani di Halaman Distanbun Provinsi Aceh tanggal 9 Agustus 2023.
3. *Business Matching* Pembiayaan CSR untuk mendorong ketahanan pangan pada tanggal 21 Agustus 2023.
4. Pemberian bantuan pompa air ke Kecamatan Samatiga, Aceh Barat untuk memastikan ketersediaan pasokan padi tanggal 22 Agustus 2023.
5. Event GNPIP di tanggal 21-22 Agustus dan disiarkan di media massa sebagai upaya peningkatan *awareness* masyarakat terhadap upaya pengendalian inflasi di daerah.
6. Pelaksanaan pertemuan antara pedagang besar di Pasar Induk Lamboro dengan penyuplai di Simalungun, Sumatera Utara (*business to business*) dalam rangka pemetaan peluang Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas cabai merah.
7. *High Level Meeting* TPID Banda Aceh pada tanggal 27 September 2023.
8. Event GNPIP melalui dukungan Gudang Pasca Panen, *digital farming*, penandatanganan kerjasama Rumah Potong Hewan dengan kelompok tani, dan pembiayaan perbankan untuk usaha untuk mendorong industri produk olahan cabai merah dan cabai rawit tanggal 24 November 2023.
9. Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Cadangan Pangan Pemerintah tanggal 12 Oktober 2023.
10. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Insentif Fiskal dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Aceh oleh Kemenko pada tanggal 06 Oktober 2023.

Aceh Tamiang dan Aceh Tengah Menjadi Kabupaten/Kota IHK Provinsi Aceh Mulai Tahun 2024

Penghitungan inflasi pada tahun 2024 memiliki penyesuaian dibanding tahun sebelumnya. Pada penghitungan baru, secara nasional terdapat 60 Kabupaten/Kota IHK baru sehingga total terdapat sebanyak 150 Kabupaten/Kota di Tahun 2024. Kab/Kota tersebut tersebar di Sumatera sebanyak 41 Kab/Kota, Jawa (38), Bali Nusra (12), Kalimantan (21), Sulawesi (24), dan Maluku Papua sebanyak (14). Seluruh Kab/Kota IHK tersebut menjadi sampel penghitungan inflasi sesuai dengan Provinsi masing-masing. Terkhusus Provinsi Aceh, saat ini terdapat 5 (lima) Kota/Kabupaten IHK, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Barat, serta tambahan baru berupa Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Selain itu, berdasarkan BPS, penghitungan inflasi juga menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) terbaru, yaitu tahun 2022 yang menggantikan SBH tahun 2018. Hal ini membuat penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar IHK baru, yaitu dari Tahun Dasar 2018 menjadi Tahun Dasar 2022. SBH dalam penghitungan inflasi digunakan untuk mengetahui bobot nilai konsumsi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan inflasi. Dalam rangka menjaga akurasi data inflasi, maka minimal setiap 5 (lima) tahun sekali akan dilakukan pembaharuan SBH. Kemudian, pembaharuan SBH juga ditujukan agar mampu mencakup perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera, dan lainnya.

Selanjutnya, pembaharuan SBH juga bertujuan agar mampu mencakup pergeseran preferensi dan prioritas masyarakat terkait konsumsi. Pembaharuan SBH juga sesuai dengan arahan dan rekomendasi internasional (*manual* CPI). Kemudian, secara nasional paket komoditas yang dijadikan sampel harga juga memiliki penambahan dari 835 paket komoditas menjadi 847 paket komoditas. Sedangkan, khusus Aceh paket komoditas bertambah dari 455 menjadi 468 paket komoditas.

Tabel 3.13 Jumlah Paket Komoditas

Kode Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Paket Komoditas	
		SBH 2018	SBH 2022
1106	KAB ACEH TENGAH		241
1107	KAB ACEH BARAT	375	376
1114	KAB ACEH TAMIANG		238
1171	KOTA BANDA ACEH	392	386
1174	KOTA LHOKSEUMAWE	383	378

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Foto 1. High Level Meeting Rapat Koordinasi Kab/Kota IHK Baru

Sumber: Bank Indonesia

Untuk menghadapi perubahan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama dengan TPID Provinsi Aceh (Kepala BPS, Kepala Biro Perekonomian Sekda Aceh, Kepala Dinas Pangan, dan perwakilan anggota TPID Provinsi), TPID Aceh Tamiang, serta TPID Aceh Tengah melakukan *High Level Meeting* yang dilaksanakan pada 6 Februari 2024, di Kota Langsa. Pembahasan pada kegiatan tersebut di antaranya adalah terkait dengan kondisi inflasi, strategi, dan sinergi yang dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi Aceh, terutama di Kabupaten IHK baru. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut pengendalian inflasi di Aceh dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi Aceh.

Selain, *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh, Bank Indonesia juga melakukan *High Level Meeting* dengan TPID Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024. TPID Kota Banda Aceh dihadiri langsung oleh Pj. Walikota Banda Aceh, Amiruddin S.E.,M.Si. beserta Forkopimda. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Bulog Aceh, Kapolres Banda Aceh, dan perwakilan TPID Kota Banda Aceh lainnya. HLM TPID Kota Banda Aceh membahas mengenai pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh menjelang bulan Ramadan, terutama komoditas pangan. Dalam kegiatan tersebut disepakati bersama akan dilakukan program pengendalian inflasi mulai dari subsidi ongkos angkut, pasar murah, Rapat juga membahas mengenai kecukupan stok beras di Aceh di tengah harga beras yang cenderung meningkat secara nasional. Kegiatan ditutup dengan melakukan kegiatan Sidak ke Pasar Murah Tanggap Inflasi yang diselenggarakan di Taman Sri Ratu Safiatuddin Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh.

Koordinasi juga dilakukan di Kabupaten/Kota non-IHK dengan mengadakan pertemuan bersama dengan Pj. Bupati Pidie dan Pj. Bupati Aceh Besar. Kedua daerah tersebut sangat penting bagi perekonomian Aceh karena merupakan daerah sentra produksi beberapa komoditas seperti padi, cabai, dan bawang merah. Diperlukan koordinasi bersama dalam memastikan produksi dan distribusi komoditas vital di kedua daerah tersebut agar dapat mendukung pengendalian inflasi pangan.

--000--



BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tetap terjaga. Hal ini tercermin dengan peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Peningkatan pembiayaan ini selanjutnya diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan lokasi bank yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Perbakan pembiayaan juga didukung oleh penurunan *Non Performing Financing* berdasarkan lokasi bank sebesar 1,57%. Kemudian untuk pembiayaan UMKM, berdasarkan lokasi proyek, rasio pembiayaannya adalah sebesar 28,21%.

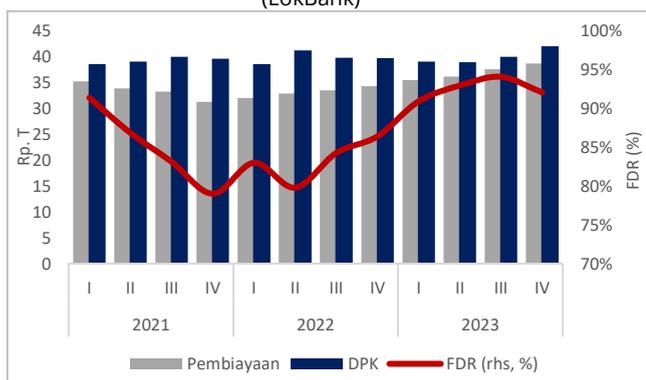
4.1. Kinerja Perbankan

Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan IV 2023 terpantau mengalami penguatan. Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 12,68% (yoy). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek menurun sebesar 1,25% (yoy). Di sisi lain, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 5,78% (yoy).

Adapun kinerja sektor perbankan dapat tercermin dari beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp38,57 Triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp37,48 Triliun atau tumbuh sebesar 12,68% (yoy). Peningkatan penyaluran pembiayaan mendorong peningkatan FDR di triwulan laporan menjadi sebesar 92,00%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 94,02%.

Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)

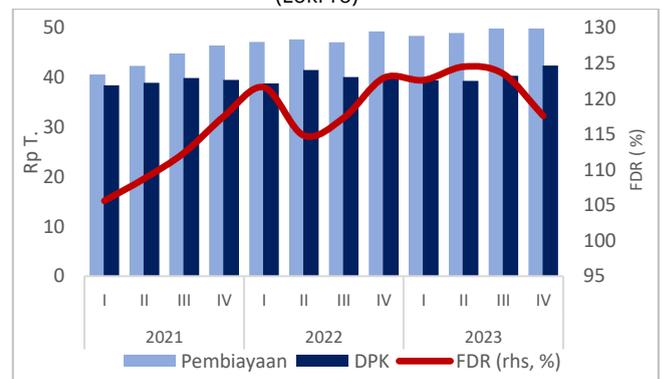


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp49,91 Triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp49,88 Triliun atau tumbuh sebesar 1,25% (yoy). Namun, FDR mengalami penurunan dari sebesar 123,51%

pada triwulan III 2023 menjadi sebesar 117,60% pada triwulan IV 2023. Penurunan FDR disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan. Dengan meningkatnya tren pembiayaan pada tahun 2023, menunjukkan kinerja penyaluran pembiayaan di Aceh masih terjaga.

Grafik 4.2 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan IV 2023, DPK di Aceh tercatat sebesar Rp41,93 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp39,87 Triliun atau tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Secara umum, DPK di Aceh mengalami tren peningkatan sejak pertengahan hingga akhir tahun, walaupun sempat menurun pada triwulan II 2023. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya penerapan Qanun LKS yang membuat peran perbankan dalam menghimpun DPK masyarakat masih belum optimal.

Grafik 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga

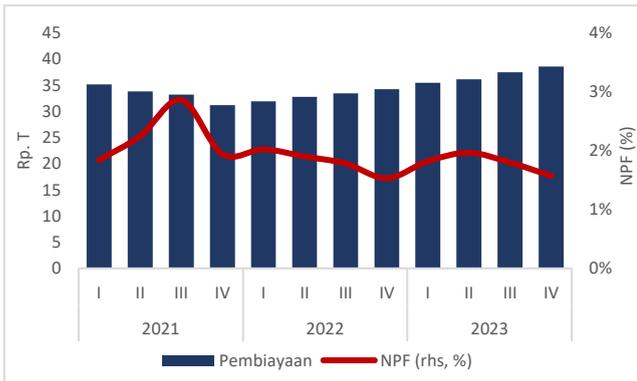


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar 1,57%, lebih rendah dibanding triwulan III 2023 sebesar 1,80% (Grafik 4.4.). Perkembangan NPF saat ini masih berada di bawah batas aman

sehingga secara umum kualitas pembiayaan masih berada pada level yang terjaga.

Grafik 4. 4 Perkembangan Non Performing Financing (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp38,57 Triliun naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp37,48 Triliun. Secara tahunan, penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 12,68% (yoy). Sejak triwulan I 2022 sampai dengan triwulan IV 2022 terjadi perbaikan penyaluran pembiayaan. Serta selama empat triwulan di 2023, penyaluran pembiayaan sudah kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19 dan bahkan lebih baik.

Grafik 4. 5Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan yang berlokasi di Aceh. Dapat dilihat pada Grafik 4.6 tentang perkembangan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp49,91 Triliun. Pada triwulan sebelumnya penyaluran pembiayaan sebesar Rp49,88 Triliun, tetap tumbuh sebesar 1,25% (yoy).

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek yang lebih besar dibanding berdasarkan lokasi bank mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan di Aceh masih memerlukan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4. 6.Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

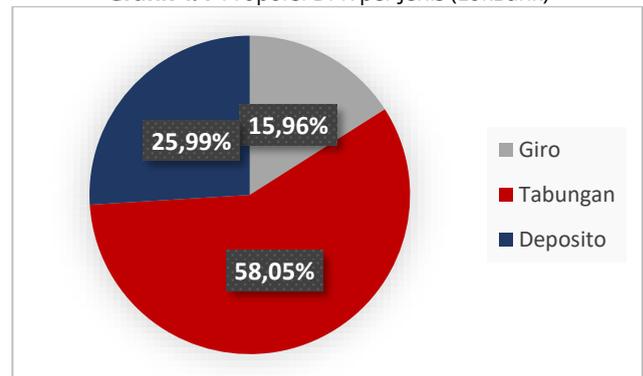
4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Berdasarkan jenisnya, DPK terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Adapun pada periode laporan, DPK didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 58,05%, diikuti deposito sebesar 25,99%, dan giro sebesar 15,96%.

Total DPK pada triwulan IV 2023 adalah sebesar Rp41,93 Triliun, yang terdiri dari giro sebesar Rp5,70 Triliun, tabungan sebesar Rp24,99 Triliun, dan deposito sebesar Rp11,24 Triliun.

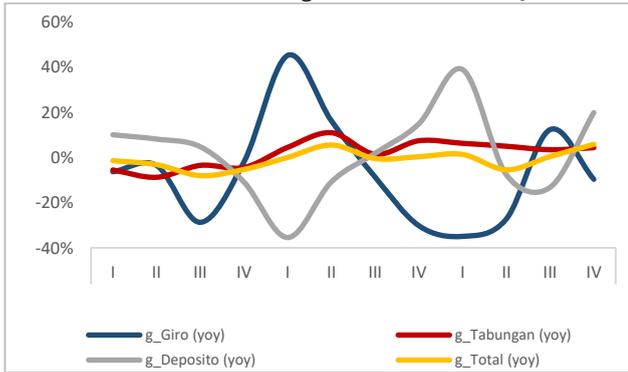
Grafik 4. 7 Proporsi DPK per Jenis (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, DPK jenis deposito menjadi jenis DPK yang mengalami pertumbuhan tertinggi. DPK jenis deposito meningkat sebesar 19,87% (yoy), begitu juga DPK jenis tabungan mengalami peningkatan sebesar 4,33% (yoy). Sementara itu, DPK jenis giro tumbuh sebesar 9,66% (yoy).

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

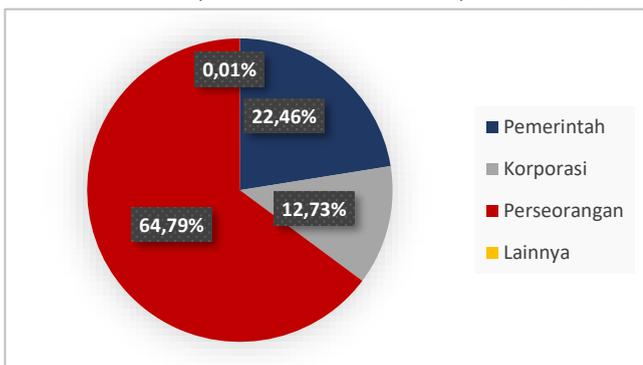


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK yang dimiliki oleh perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 64,79%. Sementara DPK milik pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki porsi sebesar 22,46% dan 12,73%.

Grafik 4. 9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari giro dengan porsi sebesar 0,32%, deposito sebesar 15,65%, dan tabungan sebesar 84,03%. Masyarakat umum kebanyakan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Hal ini disebabkan terbatasnya literasi keuangan dan faktor kemudahan membuka rekening tabungan.

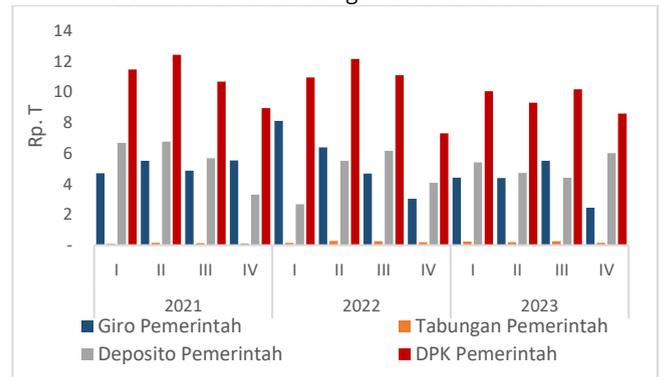
Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Perseorangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga. Pada triwulan laporan, DPK pemerintah tercatat meningkat sebesar 17,80% (yoy). Peningkatan terjadi pada deposito sebesar 47,19% (yoy), akan tetapi menurun pada giro sebesar 19,22% (yoy) dan tabungan sebesar 21,19% (yoy). Penurunan DPK pemerintah pada triwulan laporan menunjukkan bahwa terjadi realisasi belanja daerah yang tinggi. Selain itu, faktor penurunan persentase dana Otsus juga memengaruhi penurunan DPK pemerintah.

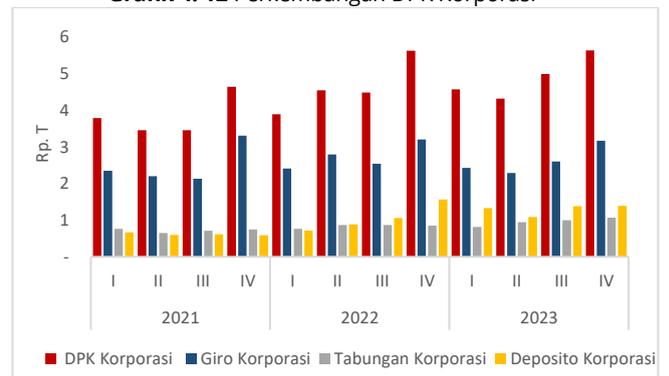
Grafik 4. 11 Perkembangan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 51,26%, deposito sebesar 21,22%, dan tabungan sebesar 27,52%. DPK korporasi jenis giro mengalami penurunan sebesar 3,27% (yoy). Sementara itu, deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 13,95% (yoy) dan 167,98% (yoy).

Grafik 4. 12 Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

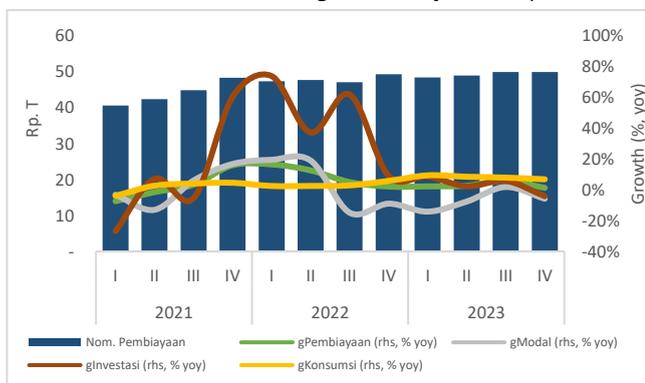
4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2023 masih menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 1,25% (yoy). Namun,

pembiayaan di Aceh masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi sebesar 6,83% (yoy). Sementara pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi masing-masing mengalami penurunan sebesar -4,13% (yoy) dan -5,79% (yoy).

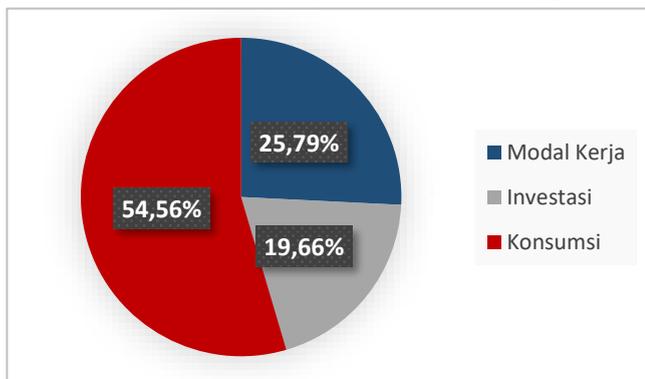
Grafik 4. 13 Perkembangan Pembiayaan (Lokpro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 54,56%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 45,44%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 19,66% dan 25,79% dari total pembiayaan pada triwulan laporan

Grafik 4. 14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan

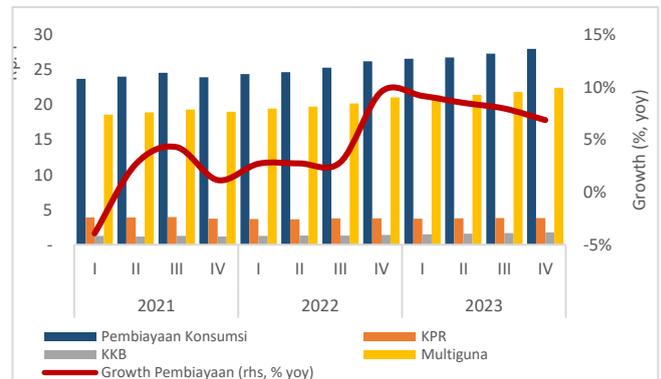


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan sektor

konsumsi menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.

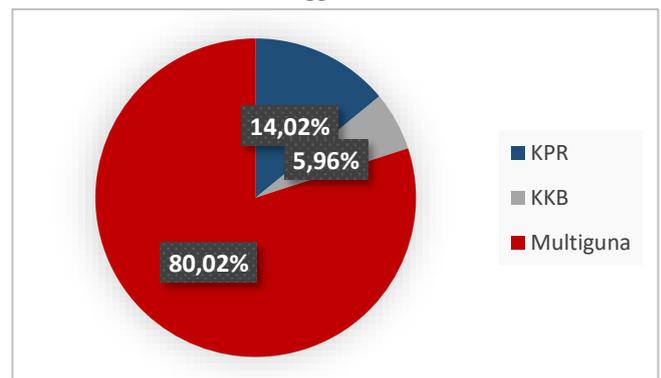
Grafik 4. 15 Pembiayaan Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan Konsumsi terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna. Pada triwulan laporan, pembiayaan konsumsi meningkat sebesar 6,83% (yoy). Tren perbaikan pembiayaan konsumsi pada triwulan berjalan terus berlanjut setelah mengalami penurunan yang drastis sejak tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pembiayaan konsumsi pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan yang turut didorong oleh momentum bulan Ramadhan serta perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha.

Grafik 4. 16 Proporsi Pembiayaan Konsumsi Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Proporsi Multiguna, KKB, dan KPR pada triwulan laporan secara berturut-turut sebesar 80,02%, 5,96%, dan 14,02%. Pada triwulan laporan, penyaluran KPR tercatat sebesar Rp3,7 Triliun, KKB sebesar Rp1,4 Triliun, dan multiguna sebesar Rp21,35 Triliun.

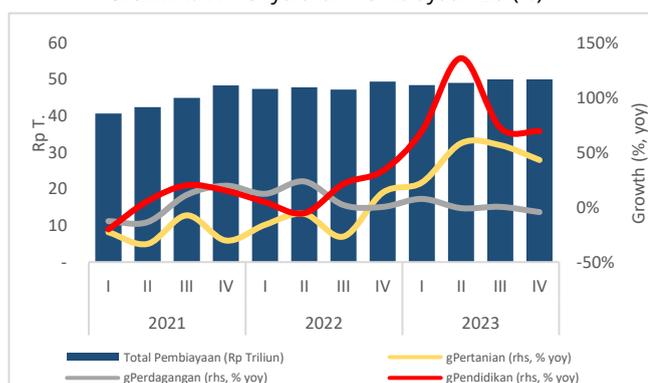
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan

dengan dengan kembali normalnya konsumsi pasca pandemi dan dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang terjaga di zona optimis. Survei Konsumen yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis pada bulan Juni 2023. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar 120,0 atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 113,67.

4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan didorong oleh tumbuhnya pembiayaan pada LU Jasa Pendidikan. Pada LU ini terjadi peningkatan sebesar sebesar 72,30% (yoy) di triwulan III 2023 dan naik sebesar 69,18% (yoy) di triwulan IV 2023. Selama empat triwulan berturut-turut LU Jasa Pendidikan mengalami peningkatan yang mengindikasikan aktivitas ekonomi di bidang pendidikan mengalami kenaikan.

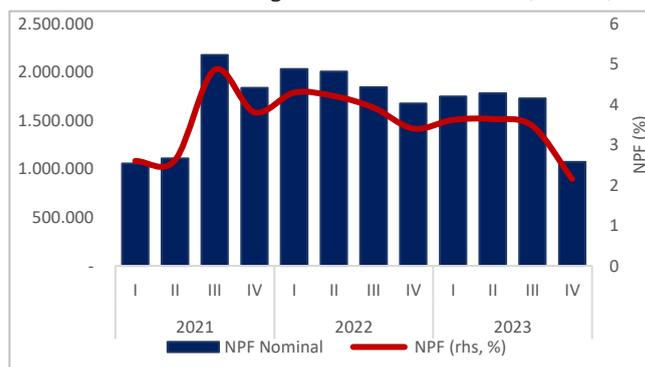
Grafik 4. 17 Penyaluran Pembiayaan LU (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kualitas pembiayaan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 (berdasarkan lokasi proyek) masih terjaga meskipun terjadi peningkatan NPF. Rasio NPF pada triwulan laporan adalah sebesar 2,15%, atau masih dalam ambang batas aman.

Grafik 4. 18 Perkembangan NPF Perbankan Aceh (LokPRO)

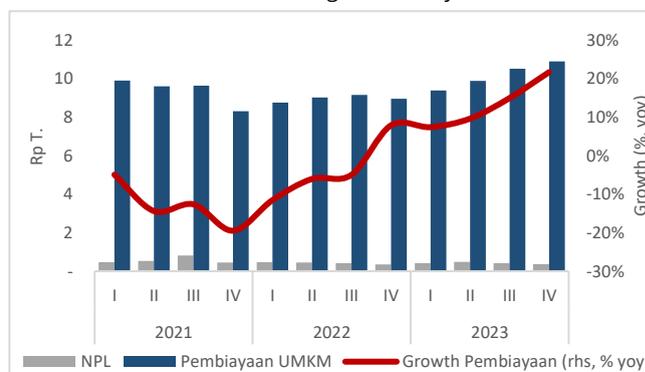


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Pembiayaan UMKM

Pada triwulan IV 2023 terjadi peningkatan pembiayaan UMKM di Aceh sebesar 21,60% (yoy). Adapun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 5,17% atau perlu diperhatikan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Sementara rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2023 sebesar 28,21%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas pembiayaan di Aceh masih potensial untuk terus ditingkatkan.

Grafik 4. 19 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional KPw Bank

Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, maupun klaster.

4.3. Langkah Peningkatan Akses Keuangan

4.3.1. Pengembangan Infastruktur Pendukung Sistem Keuangan di Aceh

Kerja sama antara Perbankan dengan penyedia jasa transaksi lintas negara melalui ATM seperti Visa/Mastercard baik sebagai issuer maupun acquirer perlu diakselerasi. Masih terbatasnya jaringan layanan Bank Syariah di Aceh yang terintegrasi dengan jaringan internasional menjadi isu tersendiri, terlebih lagi dengan mulai dibukanya pintu masuk wisatawan asing seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi. Solusi jangka pendek yaitu mendorong transaksi non tunai khususnya untuk wisatawan asing dengan memperbanyak EDC di *merchant* khususnya di kawasan wisata yang dapat melayani transaksi menggunakan kartu kredit/debit berlogo Visa/Mastercard.

4.3.2. Langkah KPw BI Provinsi Aceh dalam mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM

Sampai dengan Desember 2023, pembiayaan UMKM di Aceh sebesar Rp10,88 Triliun atau 28,21% dari total pembiayaan. KPw BI Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM di antaranya adalah pengembangan dan pendampingan UMKM Subsisten, pelatihan pembuatan laporan keuangan dengan optimalisasi SIAPIK dan BISAID, dan terakhir membuka akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk UMKM yang sudah siap dengan mengikutsertakan pelaku UMKM diberbagai kegiatan.

Salah satu kegiatan untuk mendorong UMKM dan perekonomian Aceh adalah kegiatan Festival Meuseuraya. Dari kegiatan ini didapati *business matching* pembiayaan mencapai Rp8,6 M yang melibatkan 4 perbankan dan 35 UMKM.



BAB V

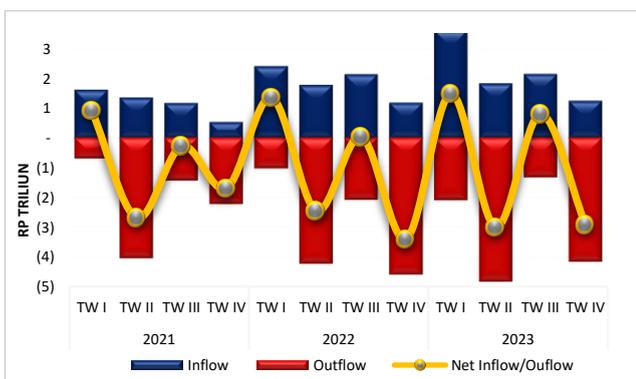
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan IV 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan IV 2023, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*¹. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp2,91 triliun, dengan total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp1,25 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp4,16 triliun (Grafik 5.1). Kondisi ini selaras dengan data tahun lalu yang menunjukkan *net inflow* terjadi pada triwulan III. *Net inflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal lebih rendah dibandingkan masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia. Sementara itu, *net inflow* pada triwulan laporan lebih besar dibandingkan dengan *net inflow* tahun lalu pada periode yang sama.

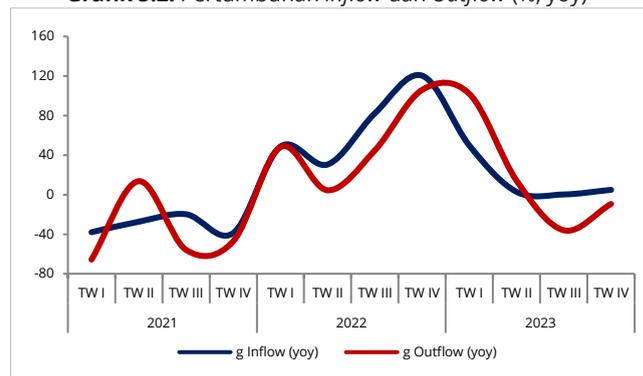
Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *inflow* pada triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93% (*yoy*). Sementara itu, *outflow* menurun sebesar 9,35% (*yoy*) (Grafik 5.2). Nilai *outflow* yang mengalami penurunan sejalan dengan pola historisnya dimana *outflow* pada triwulan ketiga lebih rendah dari triwulan sebelumnya. *Baseline* periode yang sama tahun lalu yang rendah mendukung pertumbuhan yang sangat tinggi pada triwulan saat ini.

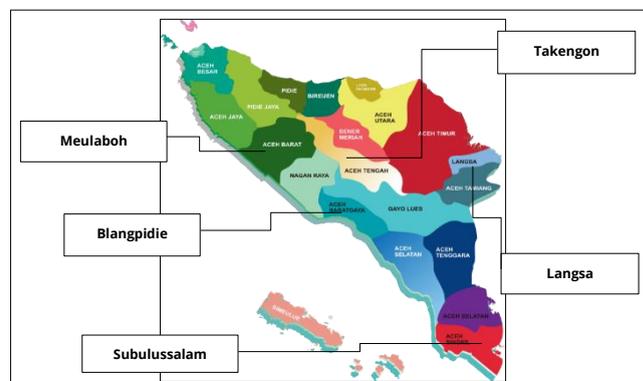
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai layanan, salah satunya Kas Titipan. Kas Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor Bank Umum untuk mencukupi persediaan kas Perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Grafik 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

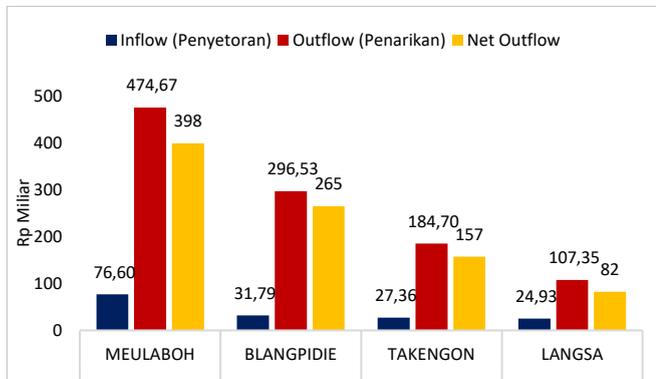
Pasca berakhirnya masa transisi implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tahun 2021, terdapat 5 (lima) Kas Titipan yang dikelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kas Titipan tersebut terdapat di Blangpidie, Meulaboh, Langsa, Takengon, dan Subulussalam. Pada bulan Oktober 2023 Kas Titipan Subulussalam dialihkan pengelolaannya ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Hal ini

¹ Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih kecil

dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kas Titipan. Sehingga terhitung sejak triwulan laporan hanya terdapat 4 (empat) Kas Titipan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

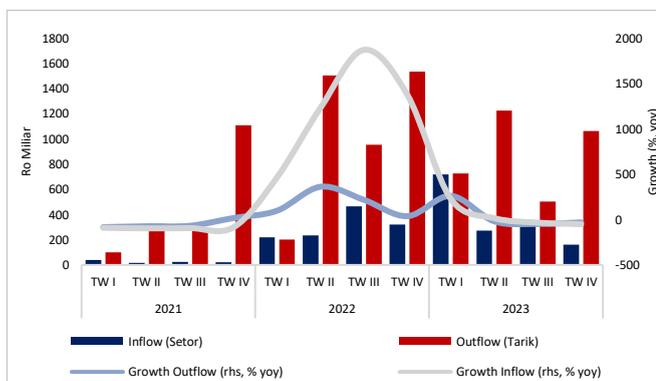
Grafik 5.4. Transaksi *Inflow Outflow* per Kas Titipan Triwulan IV 2023



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara agregat, 4 (empat) Kas Titipan di Provinsi Aceh pada triwulan laporan mengalami *net outflow* sebesar Rp192,29 miliar (Grafik 5.5). Aliran *inflow* sebesar Rp310,30 miliar atau mengalami penurunan sebesar 33,20% (yoy). Di sisi lain, *outflow* tercatat sebesar Rp502,59 miliar atau mengalami penurunan sebesar 47,38% (yoy).

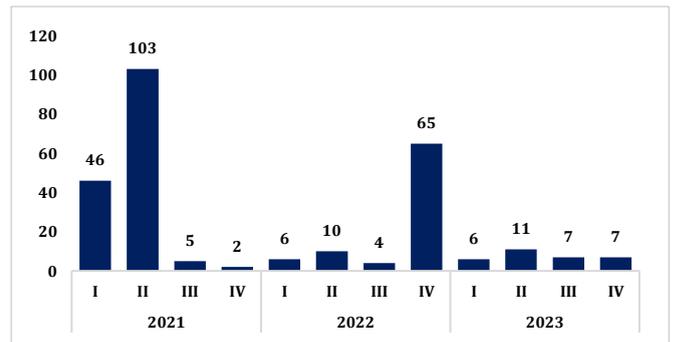
Grafik 5.5. Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni hanya 7 (tujuh) lembar yang ditemukan dengan mayoritas merupakan uang pecahan besar Rp100.000,-.

Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu (Lembar)



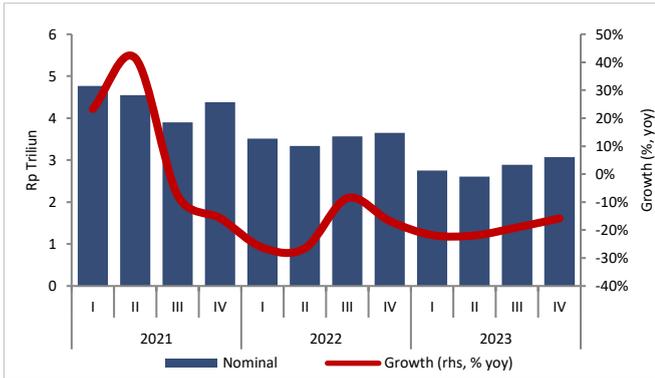
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat dalam transaksi. Begitu juga dengan penggunaan instrumen Uang Elektronik, baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2023 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disinyalir terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran ritel yang beralih (*user shifting*) menggunakan BI-FAST. Nominal transaksi tumbuh sebesar -15,84% (yoy) atau sebesar Rp3,07 Triliun (Grafik 5.7). Sementara itu, nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar Rp2,89 Triliun atau tumbuh -19,07% (yoy).

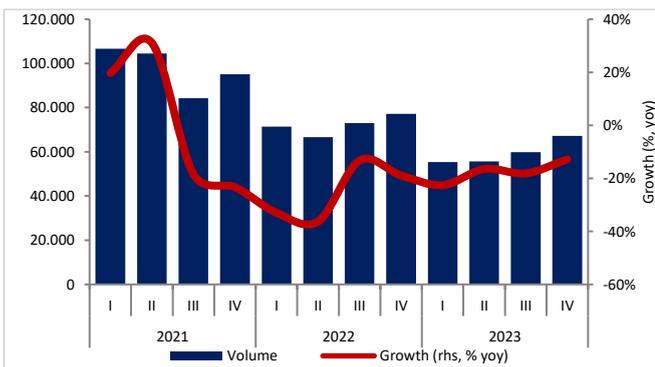
Grafik 5.7. Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume/frekuensi transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 67.217 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau tumbuh sebesar -12,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 yang tercatat sebanyak 59.808 atau tumbuh sebesar -18,11% (yoy) (Grafik 5.8).

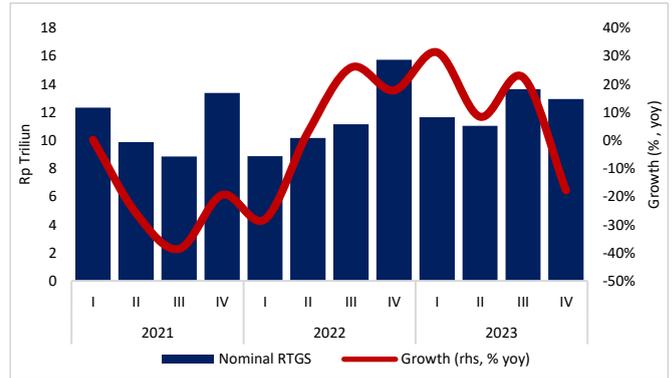
Grafik 5.8. Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat menurun pada periode laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp12,93 triliun atau tumbuh sebesar -17,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,45% (yoy) (Grafik 5.9). Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan juga menurun sebesar 5,16% (qtq) dibandingkan triwulan III 2023 yang tercatat sebesar Rp13,64 triliun.

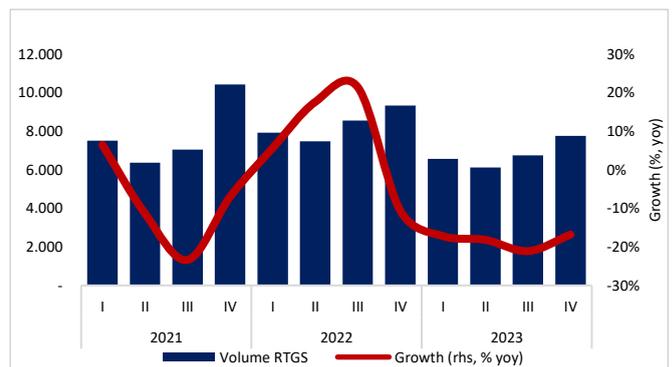
Grafik 5.9. Nominal BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume/frekuensi transaksi BI-RTGS mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan tumbuh sebesar -16,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -21,10% (yoy). Sebanyak 7.758 transaksi dilakukan pada triwulan laporan. Sementara pada triwulan sebelumnya sebanyak 6.746 transaksi dilakukan (Grafik 5.10).

Grafik 5.10. Volume BI-RTGS



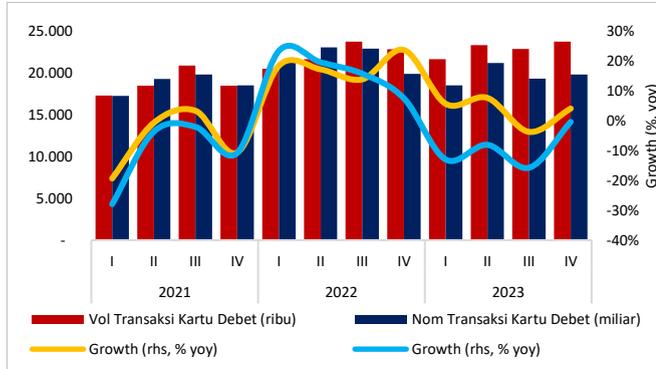
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK yaitu kartu kredit, dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami perkembangan, sementara penggunaan kartu ATM/debit mengalami penurunan. Perkembangan transaksi kartu kredit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi pada triwulan IV 2023 tercatat meningkat sebesar 4,04% (yoy) menjadi 23,73 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -3,76% (yoy) (Grafik 5.11). Sementara nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp19,80 Triliun atau tumbuh sebesar -0,42% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -15,76% (yoy). Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik tunai dengan nominal transaksi sebanyak Rp18,87 triliun (79,52%).

Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit

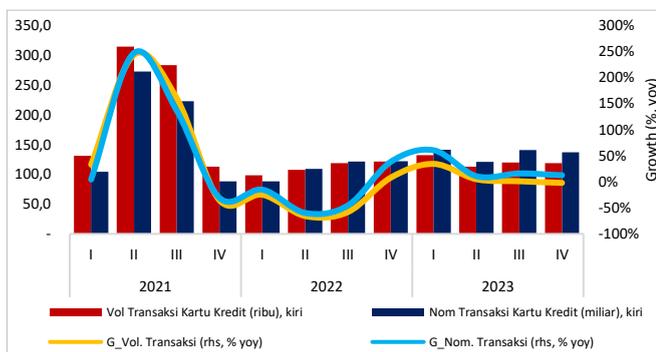


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi tumbuh sebesar -2,27% (yoy) atau sebesar 118.490 transaksi (Grafik 5.12). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp136,87 miliar atau tumbuh sebesar 12,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,77% (yoy).

Selama triwulan IV 2023, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp132,44 miliar atau 96,76% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 113.548 transaksi atau 96,21% dari total volume transaksi.

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit



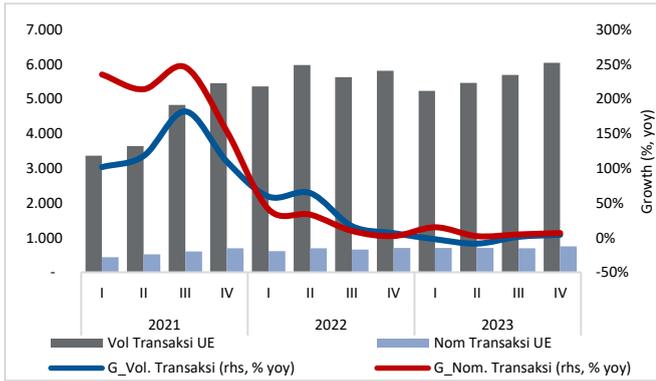
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan IV 2023

mencapai Rp751,21 miliar, atau meningkat sebesar 6,62% (yoy). Sementara volume transaksi UE meningkat sebesar 4,00% (yoy) atau sebanyak 6,04 juta transaksi selama triwulan IV 2023 (Grafik 5.13). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan IV 2023, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp493,80 miliar atau 65,73% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 4,53 juta transaksi atau 75,02% dari total volume transaksi.

Transaksi UE berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

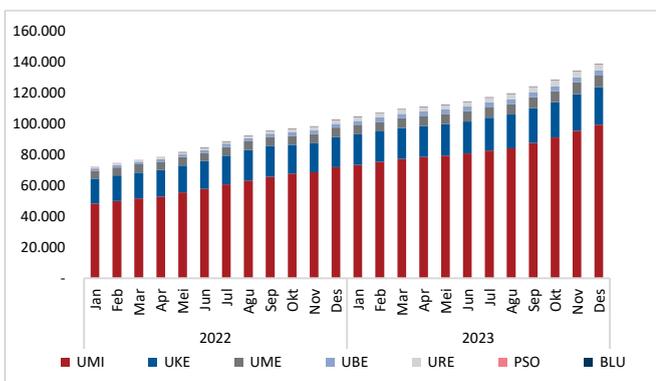
Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Hingga triwulan IV 2023, terdapat 138.192 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.14). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 35,2% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 102.245 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 11,82% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 123.583 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 99.102 *merchant* (71,71%).

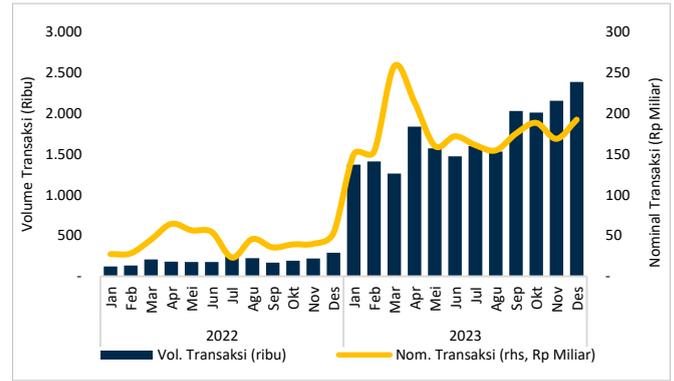
Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan IV 2023 telah terdapat 513.418 pengguna atau bertambah sebanyak 58.047 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan IV 2023 terdapat 6,54 Juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp549 miliar.

Grafik 5.15. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas).

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

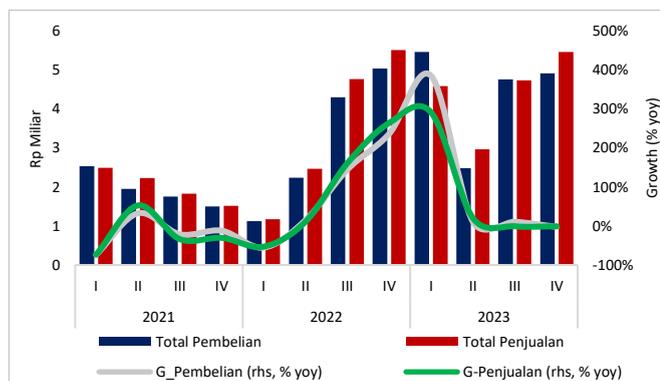
Hingga triwulan IV 2023, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan menurun sebesar 1,56% (yoy) menjadi Rp10,37 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,53 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar

2,37% (yoy) menjadi Rp4,91 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,03 miliar. Sementara penjualan UKA pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 0,81% (yoy) menjadi Rp5,46 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,76 miliar (Grafik 5.16).

Grafik 5.16. Transaksi KUPVA BB

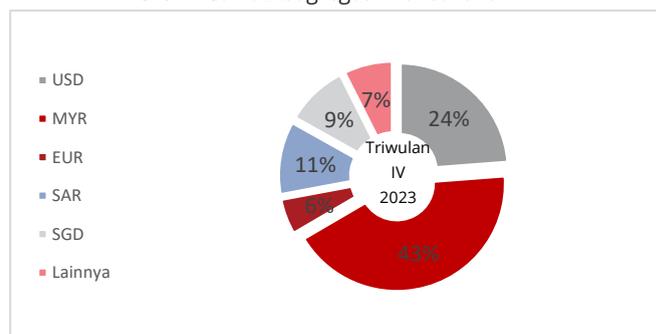


Sumber: LKPBU, diolah

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi tanda kembali dibukanya rute penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi COVID 19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya.

Grafik 5.17. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Kedepannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kembali dibukanya rute penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 43% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 24% (Grafik 5.17). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

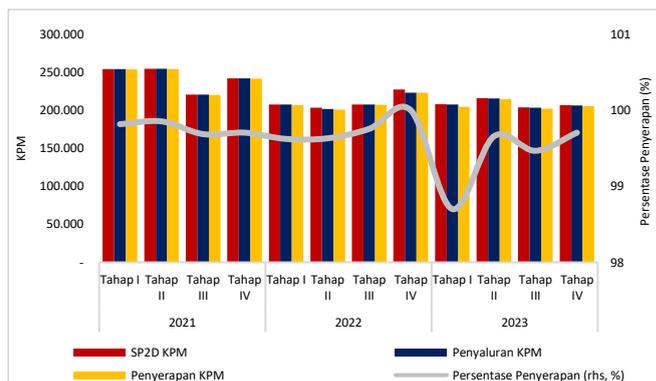
5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap IV tahun 2023 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 99,85% kepada KPM (Grafik 5.18). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV tercatat sebanyak 205.684 atau telah mencapai 99,71% dari target jumlah penerima sebanyak 206.292 KPM.

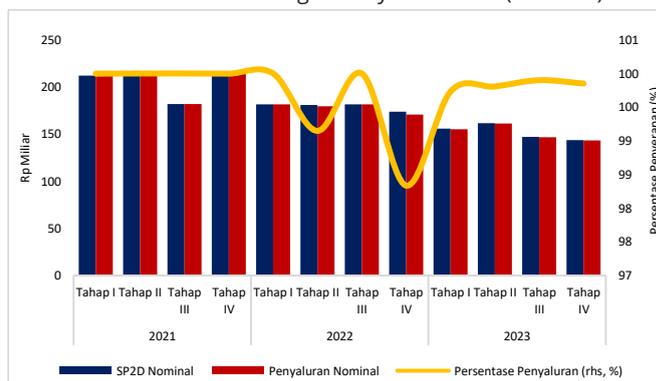
Grafik 5.18. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan IV 2023, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp143,45 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,85% (Grafik 5.19). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 yaitu Rp146,84 miliar.

Grafik 5.19. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



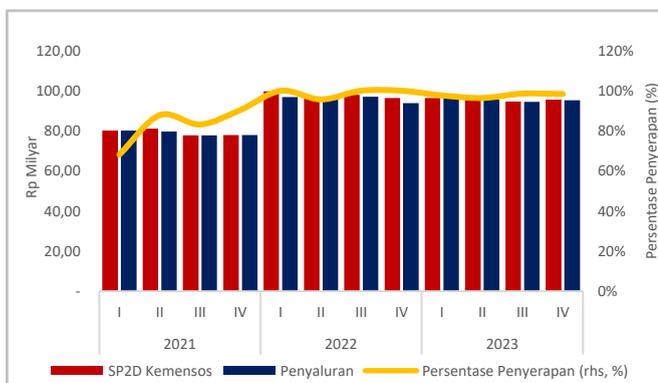
Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi

COVID-19 yang masih melanda.

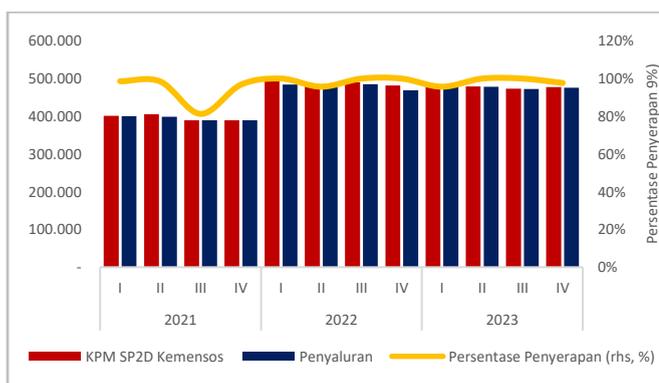
Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) 15 Februari 2022, seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos secara tunai/cash khususnya untuk penyaluran Januari hingga Maret 2022 yang dimulai dari Februari 2022 dan disalurkan 3 (tiga) bulan sekaligus per KPM. Untuk penyaluran bulan berikutnya, pihak penyalur akan dievaluasi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kemenko PMK dan Kemensos. Sementara untuk tahun 2023 bantuan sembako disalurkan melalui BSI dengan proporsi sebesar 95,50%, sementara sisanya disalurkan melalui PT Pos.

Grafik 5.20. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.21. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan mengalami peningkatan menjadi 477 ribu KPM dari jumlah KPM posisi September 2023 sebanyak 473 ribu KPM (Grafik 5.21).

5.5. Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan meliputi Uang Elektronik (*server dan chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM/debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai, khususnya melalui kanal QRIS. Peresmian Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) sebagai sebuah kawasan digital salah satunya.

Dengan diresmikannya Kawasan MRB sebagai kawasan digital diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sistem pembayaran non tunai di masyarakat. Terlebih lagi di bulan September 2024 Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. MRB sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Banda Aceh tentu akan menerima banyak kunjungan dari wisatawan dalam negeri. Guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama PON berlangsung maka diperlukan akselerasi dalam implementasi sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh.

Kegiatan selanjutnya adalah QRIS *Goes to Campus* yang diselenggarakan di 3 (tiga) Universitas di Banda Aceh, yaitu Universitas Muhamadiyah,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini menasar para mahasiswa baru dari penjuru daerah di Aceh yang belum pernah atau belum familiar dengan penggunaan QRIS ataupun sistem pembayaran non tunai.

QRIS Goes to Campus terlaksana dengan berbagai rangkaian mulai dari sosialisasi, edukasi, games, hingga pemberian *user experience* bagi seluruh peserta dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Seluruh kegiatan di atas merupakan langkah proaktif Bank Indonesia bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dalam rangka meningkatkan *supply side* QRIS melalui akuisisi *merchant* QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Perbankan dan Pemda juga terus melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan *user experience* masyarakat dalam menggunakan QRIS sehingga *demand side* masyarakat untuk menggunakan QRIS juga terus bertumbuh.

Bank Indonesia juga secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Tercatat berdasarkan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2024 telah terdapat 19 Pemda dengan kategori Digital, dan hanya menyisakan 5 Pemda pada tahap maju. Diharapkan pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan kedua, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2023 tercatat 6,03%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 64,77%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,50%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja dengan persentase terbesar adalah Lapangan usaha (LU) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,

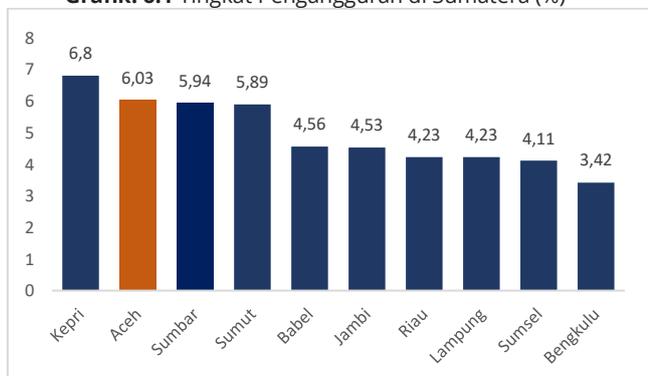
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	TINGKAT PENGANGGURAN %	
	Agustus 2022	6,17%
	Agustus 2023	6,03%

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu mencapai 2,6 juta orang (64,77%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di

Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh diproyeksikan akan semakin membaik mengingat akan dilaksanakannya PON Aceh – Sumut Tahun 2024 yang akan menyerap tenaga kerja dari sektor konstruksi untuk perbaikan dan pembangunan *venue* pertandingan olahraga, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan nasional tersebut. Selain itu, kondisi *el-nino* yang diestimasi selesai di tahun 2024 akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2022	2023
	Agustus	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.395	2.447
Pengangguran	158	157
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	63,50	64,77
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	6,17	6,03

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2023 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	38,68
Perdagangan Besar & Eceran	14,65
Industri Pengolahan	10,03
Konstruksi	7,30
Jasa Pendidikan	7,12
Administrasi Pemerintahan	6,54
Akomodasi dan Makan Minum	5,58
Jasa Lainnya	3,56

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu mencapai 38,68%. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4(14,65%), Industri Pengolahan (10,03%), Kontruksi (7,30%), dan sektor Pendidikan (7,12%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan

Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 32,65%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Sekolah Dasar ke Bawah sebesar 26,08%, SMP sebesar 19,92%, Universitas sebesar 13,13%, SMK sebesar 4,69%, dan Diploma sebesar 3,53%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus 2022	Agustus 2023
Sekolah Menengah Atas	31,07	32,65
Sekolah Dasar ke Bawah	26,19	26,08
Sekolah Menengah Pertama	19,95	19,92
Diploma IV, S1, S2, S3	12,04	13,13
Sekolah Menengah Kejuruan	4,40	4,69
Diploma I/II/III	3,35	3,53

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 35,92%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil, yaitu berstatus Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,22%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 59,86%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 40,14% di mana keduanya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,20%	35,92%
Berusaha Sendiri	25,23%	25,61%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13,29%	13,21%
Pekerja Keluarga	12,53%	11,58
Pekerja bebas di pertanian	6,11%	4,79%
Pekerja bebas di nonpertanian	4,28%	4,67%
Berusaha dibantu buruh tetap	3,35%	4,22%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) pada akhir triwulan IV 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, NTP tercatat sebesar 116,08 atau mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0,57%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat daya beli petani. NTP yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Penurunan NTP terjadi di subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor gabungan pada Desember 2024 tercatat sebesar 116,45 atau mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 116,92. NTUP menggambarkan perbandingan antara Indeks Harga yang diperoleh Petani dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani masih dalam posisi surplus.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

November 2023

116,92

Desember 2023

116,45 ▼

Sumber: BPS, diolah

⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

6.2. Kemiskinan

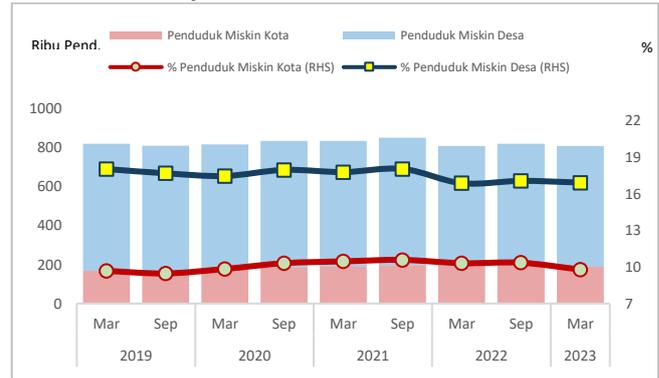
Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 14,45%, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2022 sebesar 14,64%. Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,87% dan 10,3% pada periode sebelumnya, menjadi 16,92% dan 9,79% (yoy).

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi Maret 2023 sebanyak 806,75 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 806,82 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat sebesar 0,66% (yoy) dari sebelumnya 613,49 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 617,56 ribu jiwa pada Maret 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan terbatas sebesar 2,15% (yoy), dari sebelumnya 193,32 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 189,16 ribu jiwa pada Maret 2023.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia per Juli 2023, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yaitu 123,5. Hal ini mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

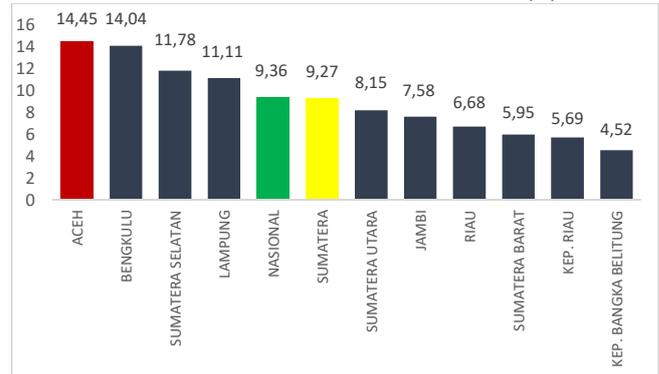
Data tingkat kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan porsi sebesar 14,45%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,27%) dan Nasional (9,36%).

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode September 2022 – Maret 2023, garis kemiskinan mengalami perubahan sebesar 1,66% sehingga pendapatan per kapita per bulan menjadi Rp627.534,- dari sebelumnya sebesar Rp617.293,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap Nilai Garis Kemiskinan baik di Perkotaan maupun Perdesaan yakni sebesar Rp475.838,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp151.689,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan sebesar 74,36% di perkotaan dan 76,68% di perdesaan yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di

perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,64% di perkotaan dan 23,32% di perdesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
SEPTEMBER 2022	14,75	▼
MARET 2023	14,45	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
MARET 2022	2,48	▼
MARET 2023	2,76	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
MARET 2022	0,61	▼
MARET 2023	0,77	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) pada periode Maret 2023 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (yoy). P1 mengalami kenaikan dari 2,48 pada Maret 2022 menjadi 2,76 pada Maret 2023. Begitu pula dengan P2 yang mengalami kenaikan setelah sebelumnya 0,61 pada Maret 2022 menjadi 0,77 pada Maret 2023. Naiknya nilai Indeks Kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin melebar.

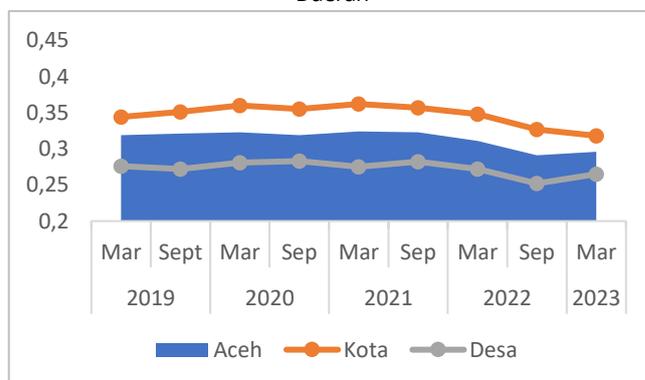
Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2022		2023	
	MARET		MARET	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,62	0,37	1,93	0,54
Perdesaan		0,73	3,20	0,89
Gabungan	2,48	0,61	2,76	0,77

Sumber: Data BPS, diolah

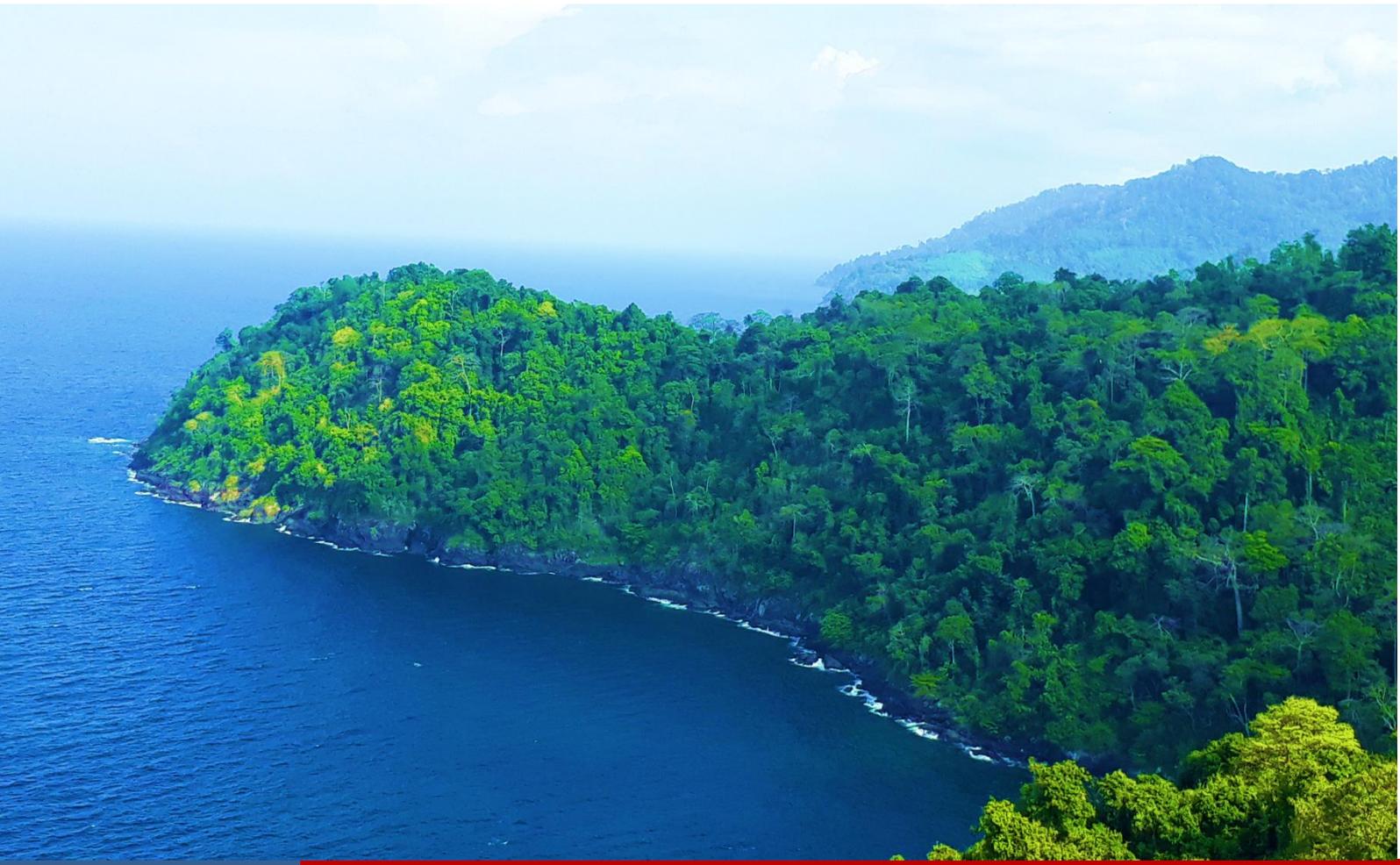
Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,318, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,265. Terjadi penurunan rasio di perkotaan dan perdesaan pada periode Maret 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi sebesar 0,296 pada Maret 2023 dari sebesar 0,311 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh 3,92%-4,72% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran batas atas sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, sejalan dengan prospek peningkatan inflasi *volatile food* di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh stabil dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan *World Economic Outlook "Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing"* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Januari 2024, perekonomian global tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,1% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan ekonomi untuk negara maju diperkirakan sedikit melambat, dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang. Sementara, pertumbuhan ekonomi negara berkembang stabil ditopang oleh menguatnya perekonomian India di Tengah moderasi pertumbuhan ekonomi China.

Tabel 7.1 *Global Economic Growth Outlook (% ,yoy)*

Wilayah	2023	2024*
World Output	3,1	3,1
Advance Economies	1,6	1,5
United States	2,5	2,1
Euro Area	0,5	0,9
Japan	1,9	0,9
United Kingdom	0,5	0,6
Emerging Market	4,1	4,1
China	5,0	4,6
India	6,3	6,5

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*

Pertumbuhan perdagangan dunia diproyeksikan sebesar 3,3% pada tahun 2024, masih di bawah pertumbuhan rata-rata historisnya sebesar 4,9%. Masih terbatasnya perdagangan dunia dipengaruhi oleh distorsi perdagangan dan fragmentasi geoekonomi. Menurut data *Global Trade Alert*, terjadi peningkatan jumlah pembatasan perdagangan yaitu sekitar 3.200 pembatasan perdagangan baru pada tahun 2022 dan sekitar 3.000 pembatasan pada tahun 2023. Kondisi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 1.100 pembatasan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Pertumbuhan

ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Investasi juga diperkirakan membaik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Di samping itu, restrukturisasi ekspor yang kini lebih mengarah pada *processing product* juga diyakini dapat memperkuat struktur ekspor Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dalam kisaran 4,7-5,5% pada 2024. Walaupun demikian, terdapat berbagai risiko yang harus diwaspadai diantaranya tantangan ekonomi global yang makin bergejolak akibat meningkatnya fragmentasi geoekonomi.

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Nasional, ekonomi Aceh pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 3,92%-4,72% (yoy).

Membaiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi Provinsi Aceh sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB. Sedangkan dari sisi LU, laju pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh LU pertanian, kehutanan dan perikanan, serta LU perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga didorong oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilu 2024 yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Walaupun demikian, resiko inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2024 dapat berpotensi menahan konsumsi Masyarakat. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Januari 2024 mengindikasikan bahwa konsumen masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2024 tercatat sebesar 116,38 yang dipengaruhi oleh naiknya harga gabah kualitas GKP pada tingkat petani dan penggilingan.

Angka tersebut masih melanjutkan tren perbaikan dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 116,08.

Sementara, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Namun demikian, terdapat risiko menurunnya konsumsi pemerintah seiring berkurangnya besaran dana otonomi khusus. Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran APBD. Rencana anggaran belanja Aceh tahun 2024 sebesar Rp27,87 Triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp36,13 Triliun. Pada APBD 2024, terdapat penurunan penerimaan besaran dana otonomi khusus (Otsus) dari Rp7,5T pada tahun 2022 menjadi Rp3,9T pada tahun 2024 atau setara dengan 1% plafon DAU Nasional.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penghapusan beberapa proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Aceh dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe dan Lhokseumawe-Sigli. Sementara itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 diantaranya finalisasi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Kereuto, Bendungan Rukoh, dan Daerah Irigasi Lhock Guci serta Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan. Selain pembangunan PSN, persiapan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 juga berpotensi mendorong kinerja investasi di tahun 2024.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh

Bank Dunia, harga batu bara tahun 2024 berpotensi mengalami penurunan menjadi USD 130/ton dari USD 175/ton pada tahun 2023. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi USD 4,40/kg dari USD 4,45/kg pada tahun 2023. Lebih lanjut, harga CPO diproyeksi mengalami normalisasi menjadi USD 1.100/ton dari USD 1.070/ton pada tahun 2023.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Konstruksi, serta LU Pertambangan. Secara umum, perkiraan kinerja positif pada LU Transportasi dan Pergudangan didukung oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 yang berpotensi mendorong mobilitas masyarakat baik dari dalam maupun luar Aceh.

Lebih lanjut, kondisi cuaca yang lebih baik pada tahun 2024 juga berdampak positif pada LU Pertanian. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diprakirakan akan membaik sejalan dengan perbaikan harga komoditas batubara dan dicabutnya larangan ekspor komoditas batubara.

Selanjutnya, LU Perdagangan diprakirakan akan masih akan tumbuh tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

Sementara, LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Kinerjanya yang membaik sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2024.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), inflasi global diperkirakan menurun dari 6,9% (yoy) pada 2023 menjadi 5,8% (yoy) pada 2024 dan kembali menurun menjadi 4,4% (yoy) pada 2025. Angka tersebut masih

berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi masih didorong oleh potensi kenaikan harga pada komoditas pangan dan energi akibat dampak konflik global. Sejalan dengan kenaikan inflasi global, inflasi domestik diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $2,5\pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2024, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada di sekitar batas atas sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy). Pada tahun 2024, terjadi perubahan tahun dasar dari 2018 menjadi 2022 dan penambahan 2 kota IHK baru di Provinsi Aceh yaitu Kab. Aceh Tengah dan Kab. Aceh Tamiang. Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Februari 2024 tercatat sebesar 2,33% (yoy). Inflasi berpotensi untuk kembali meningkat pada tahun 2024, sejalan dengan prospek peningkatan inflasi *volatile food* di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

Dari sisi komoditas bahan makanan, terdapat risiko efek pergeseran musim panan akibat El Nino yang terjadi pada tahun 2023 khususnya untuk komoditas beras yang masih terus naik hingga saat ini. Sementara dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, terdapat risiko kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen dan cukai rokok elektrik sebesar 15 persen pada 2024. Penetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021.

Inflasi Provinsi Aceh pada 2024 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun demikian, beragam kegiatan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) yang dilakukan oleh TPIP, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh. Pemerintah Aceh, BI, Satgas Pangan, serta pihak-pihak terkait bersama-sama dalam TPID terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Strategi dan antisipasi manajemen pasokan untuk komoditas perikanan (salah satu inflatoir terbesar) juga terus

digalakkan, diantaranya melalui pemanfaatan *cold storage* eksisting, pembangunan *cold storage* baru, kerja sama antar daerah, dan operasi pasar. Hal ini diperkirakan mampu meredam gejala kenaikan harga sehingga secara keseluruhan tahun 2024, inflasi Provinsi Aceh diperkirakan berada di batas atas sasaran inflasi Nasional.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) identifikasi *implementing partner* yang potensial di Aceh (industri yang mampu menjadi *offtaker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan

oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten/kota.

2. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

3. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.

4. **Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.** Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh No.8 Tahun 2016

tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah Pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.

5. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2024.

6. **Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.

7. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki

oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

8. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi Pemda, BI, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.
9. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh***. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.
10. ***Debottlenecking* kendala atau hambatan investasi di Aceh**. Dalam *focus group discussion*

(FGD) *Aceh Gayo Investment Dialog (AGASID) 2023*, diketahui beberapa kendala/hambatan investasi di Aceh, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di Aceh dalam menyiapkan proposal proyek yang layak dan komprehensif serta materi promosi krusial lainnya. Sebagai solusi dari kendala ini, RIRU Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* penyusunan proposal investasi yang di dalamnya terdapat 7 aspek penting dalam penyusunan proposal investasi, termasuk simulasi perhitungan kelayakan proyek investasi. Status *clean and clear* untuk beberapa proyek investasi di Aceh masih belum jelas, bahkan beberapa proyek investasi masih terkendala hal mendasar seperti keterbatasan dukungan data. Selanjutnya, terdapat kendala kebijakan sewa lahan maksimal 5 (lima) tahun yang dikeluhkan oleh para investor, sehingga diperlukan percepatan perumusan dan pengesahan aturan perubahan untuk perpanjangan sewa lahan tersebut.

Inflasi

Pada tahun 2024, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tetap diperlukan kerjasama dengan TPID Aceh untuk dapat mengendalikan laju inflasi. Lebih lanjut, pengendalian inflasi juga akan mengikuti peta jalan atau *roadmap* jangka pendek (2022-2024) yang telah disusun sebelumnya. Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Aceh pada tahun 2024. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

1. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis** didukung oleh program pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras, pelaksanaan pasar murah

(terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda).

2. **Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis, yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan.**

Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit), produksi komoditas peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (contoh di Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis, yaitu penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.**

Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (komoditas lokal dan ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.

4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi, yaitu memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.**

Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan melalui program rilis pers/media khususnya terkait upaya TPID dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh**

secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bijak berkonsumsi dan himbauan penggunaan cabai kering.

6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh**

untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk

organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemeri adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022** yang antara lain mencakup usulan pembentukan satu data terpadu, pemetaan pelaku pasar dan sentra produksi di Aceh, *timing* panen dan sistem *stock*, serta koordinasi dengan bulog untuk *cold supply chain*. Anggaran tanggap darurat dapat dimanfaatkan untuk ongkos logistik bahan pangan. Dana gampong bersama-sama dapat digunakan untuk membangun pabrik beras premium. Kemudian akan disusun Pergub yang mewajibkan ASN membeli beras premium produksi Bulog Aceh/Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
8. **Mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan Stabilisasi Suplai Gabai untuk Menjaga Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan meningkatkan kualitas pengolahan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super. Lebih lanjut, melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras di Provinsi Aceh. KAD dapat dilakukan dalam bentuk gabah, untuk menstabilkan pasokan gabah di Aceh sepanjang tahun. Ataupun, dapat dilakukan langsung dengan berbentuk beras dengan upaya menstabilkan pasokan sepanjang tahun.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Rony Widijarto P.

KOORDINATOR PENYUSUN

Hendy Hadiyan

TIM PENULIS

Hafidz Yudhansyah

M. Indra Saputra

Imam Wahyudi

M. Fikrisani

Irfan Bagus Rachmanto

Handoko

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx?Kategori=aceh&Periode=>